

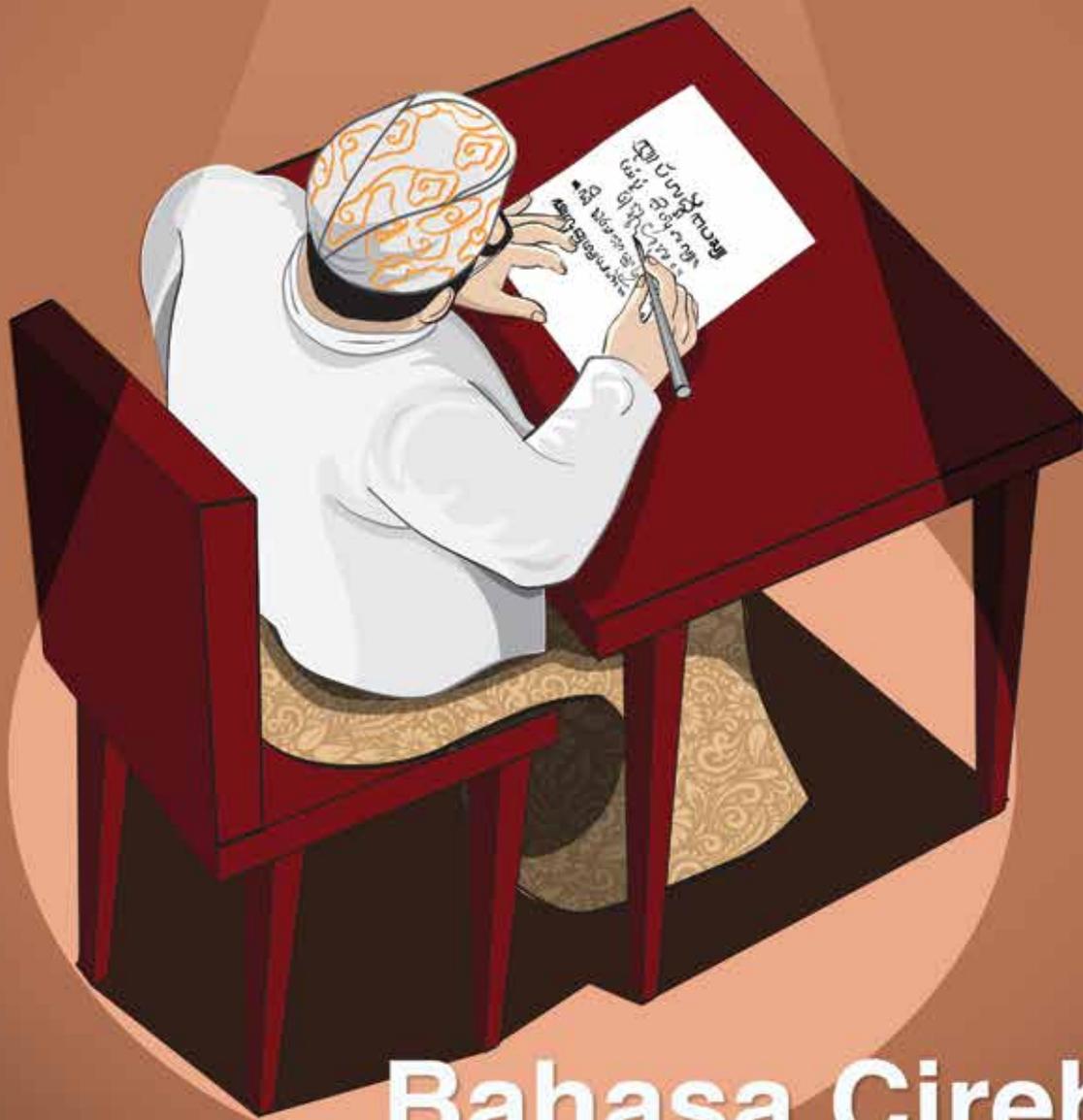
Edisi Khusus

Fokus | Tak Miliki Kurikulum Lokal Hingga Minim Pengajar



Cirebon Katon

Berita & Informasi Wakil Rakyat



Bahasa Cirebon Riwayatmu Kini

Edisi April 2022

Majalah ini tidak diperjualbelikan

Perayaan Hari Jadi



Setiap 2 April, Kabupaten Cirebon senantiasa memperingati hari jadi. Tanggal tersebut ditetapkan berdasarkan peristiwa lampau: lepasnya Kesultanan Cirebon dari Kerajaan Pajajaran pada 2 April 1482 silam.

Tahun ini, usia Kabupaten Cirebon telah genap menginjak 540 tahun. Pemerintah Kabupaten Cirebon maupun seluruh instansi tak luput memeriahkan hari dikenangnya peristiwa *pegot tetali pancen* tersebut, melalui berbagai macam selebrasi kegiatan. Dari lomba, kajian, pemutaran film hingga ajang seremoni lainnya.

Tak lupa DPRD dan Bupati juga menggelar paripurna hari jadi dengan menampilkan kekhasan budaya dan kesenian Cirebon.

Selebrasi atau ekspresi emosional untuk merayakan hal tertentu merupakan sesuatu yang lumrah. Meski demikian, setiap selebrasi yang dinanti juga mempunyai arti. Lalu apakah makna dan pesan dari selebrasi perayaan

hari jadi Kabupaten Cirebon?

Pada edisi ini, dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Cirebon, kami pun menyajikan liputan khusus mengenai bahasa dan aksara Cirebon.

Sebagai satu suku, Cirebon memiliki karakteristik unik bahasa. Hal tersebut tak terlepas dari kondisi geografis yang sempit menjadi wilayah titik temu semua etnis, ras, suku bahkan agama. Sehingga, bahasa Cirebon memiliki kekhasan yang unik dan penting diketahui sejauh mana upaya pelestariannya.

Selain perayaan hari jadi, bulan April tahun ini, kita memasuki bulan ramadan dalam hitungan hijriyah. Ramadan dimaknai sebagai bulan peningkatan ibadah dan sarana perjuangan bagi umat muslim. Oleh karenanya kami seluruh jajaran redaksi majalah Cirebon Katon mengucapkan Marhaban Ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Dan selamat membaca Cirebon Katon.

Pembina/Penasehat :

H. Mohamad Luthfi, ST, M.Si
(Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Rudiana, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Teguh Rusiana Merdeka, SH
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Drs. H. Subhan
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Pengarah :

Muklisin Nalahudin, SH, MH.
(Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kab. Cirebon)

Munawir, SH.
(Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab. Cirebon)

Abdul Rohman
(Ketua Komisi 1)

Mad Saleh
(Ketua Komisi 2)

H. Hermanto, SH
(Ketua Komisi 3)

Siska Karina, MH
(Ketua Komisi 4)

Pimpinan Umum/Pimpinan Redaksi :

Ikin Asikin, S.Sos, M.Si
(Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon)

Wakil Pimpinan Redaksi :

Drs. Raden Chaidir Susilaningrat
(Kabag Humas, Protokol, Kerjasama, dan Aspirasi)

Drs. H. Sucipto, MM
(Kabag Persidangan dan Perundang-undangan)

Redaktur Pelaksana :

Handi Eko Prasetyo, S.Kom, MM
(Kasubag Humas dan Protokol)

Redaksi Ahli :

S. Yudi

Penyunting :

Dra. Puti Amanah Sari
(Kasubag Kerjasama dan Aspirasi)

Redaktur :

Yusuf

Reporter :

Supardi • Kustano • Muiz • Amir

Fotografer :

Qushoy

Desain Grafis :

Boyke Datu • Andri

Data dan Riset :

Oman

Distribusi :

Firman • Misbah

Korespondensi:

redaksi.cika@gmail.com

Penerbit :

Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon
Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber Cirebon
• Telp. 0231 32150 • Kode Pos 45611



04 | FOKUS

Gotrasawala
Mata Rantai Penamaan Bahasa Cirebon

7 | Menilik Ragam Aksara Cirebon

11 | Pegiat Bahasa:
Bahasa Cirebon Seolah Dibunuh



22 | LENSA

Kapal Otok-otok
Mainan Ikonik yang Tak Sepi Peminat



28 | INSPIRASI

Jamur Krispi Mushi
Bersiap Tembus Pasar Global



30 | PROFIL

Sekretaris DPRD Ikin Asikin
Mantan Atlet, Hobi Berkebugaran



34 | DINAMIKA

Perda Retribusi Bangunan Gedung Disahkan

36 | Validitas LKPJ 2021 Dipertanyakan



36 | POTENSI

Bukit Pasir Selawe
Segera Jadi Wisata Paralayang



38 | DESA

Beber
Manfaatkan Hutan Jadi Wisata Belajar

Gotrasawala

Mata Rantai Penamaan Bahasa Cirebon

Meski tak secara eksplisit, babak awal penamaan bahasa Cirebon ditengarai setelah kegiatan Gotrasawala digelar yang menyisakan ratusan naskah.



Foto: foto: National Archief @ Cirebonheritage

Cirebon 1910-1914

Pada medio 1620 Masehi, Cirebon menjadi tempat agenda besar yang dihadiri banyak pujangga, ahli sastra dari wilayah Nusantara hingga mancanegara. Acara tersebut dinamakan Gotrasawala yang digagas Pangeran Wangsakerta, seorang putra Panembahan Girilaya, Sultan Cirebon.

Sebagai wilayah yang berada di pantai utara, Cirebon merupakan destinasi studi dan titik temu seluruh berbagai etnis dan suku. Tak heran, jika kemudian Cirebon memiliki bahasa khas karena menyerap bahasa-bahasa yang ada di Nusantara.

Ketua Dewan Kesenian Cirebon Akbar Sucipto mengungkapkan, kegiatan Gotrasawala tersebut, menyisakahkan naskah-naskah yang selanjutnya dikoleksi Pangeran Wangsakerta. Menurutnya, seiring waktu, naskah tersebut menjadi embrio awal mula

terbentuknya bahasa Cirebon.

“Salah satunya mengenai alfabet yang mulai berbeda di setiap daerah. Semula penulisan bahasa Sunda dan Jawa itu sama. Setelah kegiatan tersebut muncul jenis-jenis tulisan yang berbeda,” ungkap Akbar.

Lahirnya bahasa Cirebon juga dipengaruhi sejarah penyerbuan Mataram ke Batavia (Jakarta). Cirebon, sempat menjadi lokasi pemberhentian pasukan Mataram pada tahun 1628 dan 1629 M.

Fakta cikal bakal akulturasi kebahasaan semakin terlihat. Dalam perjalanan, Sultan Agung An-yokrokusumo, Raja Mataram saat itu menaruh pasukan di wilayah pantai utara termasuk Cirebon sejumlah 500 ribu pasukan.

Ketika pasukan Jawa dari Mataram ini berangkat



Cirebon 1947

menyerang Batavia, para pasukan tak sedikit yang menetap di sekitar pantura. Mereka menyebar di wilayah Cirebon, Indramayu, Subang, Tegal dan Brebes sehingga melahirkan proses akulturasi.

“Seiring waktu setelah puluhan tahun menetap lahirlah bahasa baru yang dikenal dengan bahasa Cirebon. Jadi memang berasal dari sejarah panjang,” ujar Akbar.

Asal-usul bahasa Cirebon, kata Akbar, merupakan proses metamorfosis dari perjalanan panjang bahkan beriringan masuknya kerajaan-kerajaan India ke Nusantara

pada sekitar tahun 300 hingga 400 Masehi. Seperti Kerajaan Salakanegara, Tarumanegara, Pajajaran dan Majapahit.

Bahasa kerajaan-kerajaan di Nusantara tersebut, menggunakan huruf atau alfabet yang sama. Baik Sunda, Jawa yang memakai aksara hanacaraka atau aksara carakan.

“Saya anggap ini merupakan kekuatan dan kecerdasan bangsa kita khususnya di Nusantara, karena bahasa-bahasa yang datang ke nusantara itu kemudian terjadi akulturasi atau perkawinan dengan bahasa lokal di

daerah tersebut. Sehingga kemudian lahirlah bahasa Kawi, Jawi atau Jawa,” jelas Akbar.

Sementara bahasa Cirebon, berasal dari proses dialektika kesastraan yang bertemu dalam lintas zaman hingga terbentuk bahasa tertentu.

Secara budaya dan bahasa, Cirebon berada di antara masyarakat yang berbahasa Sunda dan Jawa. Wilayah sekitar yang menggunakan bahasa Sunda, yakni Majalengka dan Kuningan. Sedangkan bahasa Jawa yaitu Indramayu dan Brebes.

Menurut Yayat dalam jurnal “Bahasa Daerah di Wilayah Cirebon”, percampuran orang Jawa dan Sunda di wilayah Cirebon melahirkan orang Cirebon.

Keduanya hidup berdampingan dan berkomunikasi menggunakan dua bahasa yang dicampur. Campuran bahasa Sunda dan Jawa di wilayah Cirebon itulah yang selanjutnya menghadirkan bahasa Cirebon.

Meski masyarakat Cirebon secara etnik dapat dibedakan menjadi dua suku: Sunda dan Jawa. Masing-masing suku memiliki budaya dan bahasanya sendiri-sendiri. Suku Sunda kebanyakan mendiami daerah dataran tinggi atau selatan Cirebon.

“Kontak bahasa terjadi karena kedua suku yang mendiami daerah Cirebon memerlukan sarana komunikasi sehingga terwujudlah dua bentuk bahasa yang merupakan fusi dari dua buah bahasa,” tulis Yayat.

Bahasa Cirebon dapat dipandang sebagai dialek dari dua bahasa. Jika yang dominan adalah bahasa Sunda, maka disebut bahasa Sunda dialek Cirebon. Jika yang dominan adalah bahasa Jawa, maka disebut bahasa Jawa dialek Cirebon.

Gabungan dari dua bahasa



Cirebon 22-23 Juli 1947

tersebut tidaklah selalu seimbang bobotnya. Bervariasi tergantung bahasa itu lebih banyak digunakan. Bahasa Sunda Cirebon di daerah selatan, tak sedikit yang memperoleh pengaruh bahasa Jawa. Sedangkan bahasa Cirebon di pusat-pusat pemukiman juga memperoleh pengaruh bahasa Sunda.

Pengaruh dari bahasa lain mencakup berbagai tataran linguistik, seperti fonologi, morfologi, leksikal dan sintaksis.

Keadaan itu lah yang menggambarkan daerah Cirebon muncul dua macam bahasa, yakni bahasa Cirebon yang berbasis bahasa Sunda, dan bahasa Cirebon yang berbasis bahasa Jawa.

Meski demikian, Akbar menerangkan jika kelahiran bahasa

Cirebon jenis Bebasan diciptakan sengaja pada masa pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DI TII) di Jawa Barat.

Akbar pun mengutip pendapat Budayawan Cirebon Almarhum Nurdin M Noer, yang menjelaskan salah satu anggota DI TII yang berasal dari Cirebon memakai dialek Cirebon dalam percakapan sehari-hari sebagai kode pembeda komunikasi antara Anggota DI TII dengan masyarakat Cirebon yang tidak tergabung pemberontakan.

Saat itu, seorang tokoh berinisiatif menggunakan bahasa Cirebon Bebasan untuk digunakan masyarakat Cirebon agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Setelah DI TII habis, penggunaan bahasa Bebasan ternyata

ta tetap digunakan oleh masyarakat Cirebon. Sehingga seiring perjalanannya menjadi bahasa mandiri yang berasal dari serapan bahasa para leluhur.

“Jadi memang kalau Bebasan itu bahasa yang diciptakan oleh kita sendiri yang tidak terpengaruh oleh bahasa Jawa atau pun Sunda. Diambil dari bahasa nenek moyang dulu dan diserap. Kalimat dan pengucapannya lebih halus,” jelas Akbar.

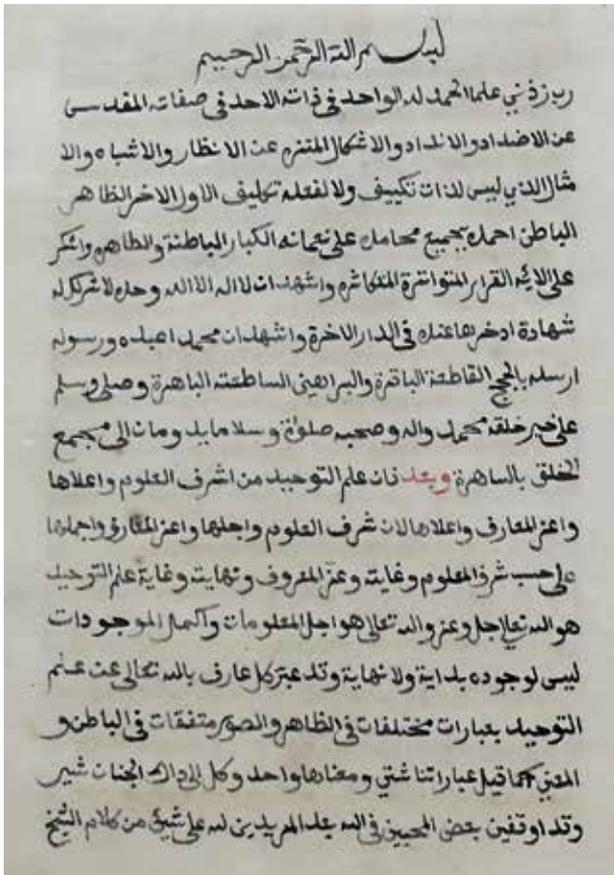
Keberadaan bahasa Cirebon sebagai bahasa mandiri, seiring waktu akhirnya diperkuat dengan lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 yang memasukan bahasa Cirebon menjadi bahasa yang diakui di Jawa Barat selain Sunda dan Betawi. •Suf

Menilik Ragam Aksara Cirebon

Ada 5 ragam aksara yang dimiliki Cirebon dan sempat menandakan peradaban yang maju. Apa saja?

Cirebon merupakan daerah di kawasan pantai utara (pantura) Jawa Barat yang masih kental dengan sejarah dan budaya. Keberadaan ragam aksara di Cirebon menjadi salah satu bukti kuat bagaimana perjalanan dan perkembangan Cirebon beberapa abad silam. Budayawan Cirebon Mukhtar Zaedin menuturkan, setidaknya ada lima aksara yang masuk ke Cirebon.

Aksara arab



Keberadaan aksara arab ditandai dengan masuknya bangsa Arab ke Cirebon melalui pelabuhan Muara Djati pada sekitar tahun 1300 M, untuk melakukan transaksi perdagangan.

Adapun kisah masuknya bangsa Arab yang terkenal yakni pada tahun 1410 Masehi. Tepatnya, pada

masa Syekh Nurjati bersama sejumlah kongsi Arab datang dalam rangka menyebarkan ajaran Islam.

Misi dakwahnya juga diterapkan bersama Sunan Gunung Jati. Hingga dalam perkembangannya, banyak warga Timur Tengah yang memilih menetap dan menikah dengan pribumi. Salah satu buktinya kehadiran Kampung Arab yang terletak di Lemahwungkuk, Kota Cirebon.

“Mereka punya komunitas dalam menyebarkan ajaran Islam. Sehingga menurut saya, pada masa-masa itu aksara arab sudah digunakan di Cirebon,” katanya.

Aksara China



Keberadaan aksara ini ditandai dengan masuknya bangsa Cina ke Cirebon. Budayawan Tionghoa asal Cirebon Jeremy Huang pernah mengungkapkan, warga Tionghoa datang berbondong-bondong ke Cirebon membawa barang perdagangan. Salah satu tokoh Tiongkok yang terkenal adalah kedatangan Laksamana Cheng Ho ke Pelabuhan Muara Jati pada sekitar tahun 1400.

Menurut Jeremy, salah satu rombongan Laksamana Cheng Ho menamakan Cirebon dengan sebutan Ching Li Wen, yang artinya sumber yang dalam. Sebutan itu juga terdapat dalam buku “Yingya Sheng Lan” dikarenakan Cirebon memiliki banyak kekayaan alam dan hewan laut.

Pada tahun 1700 M, salah seorang bangsa Cina Tan Ko Leng tinggal dan menetap di daerah Gebang. Dan memiliki banyak keturunan yang tinggal

dan menetap di beberapa wilayah Cirebon. Dengan begitu, kedatangan bangsa Tiongkok diduga kuat membawa aksara Cina. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya benda peninggalan Cina dan terdapat tulisan jenis aksara cina seperti makam Cina.

Aksara Hanacaraka



Pada tahun 1400-an, aksara Hanacaraka telah digunakan masyarakat Cirebon. Dalam Naskah Nagarakertahabumi, Pangeran Wangsakerta menjelaskan, masyarakat saat itu telah mengenal aksara seperti aksara Cina dan Arab. Selain bahasa Cirebon, aksara Hanacaraka juga digunakan untuk menulis dan mengucapkan bahasa Jawa, Sunda dan Bali.

“Baik di Sunda, Bali maupun Cirebon jenis aksaranya sama seperti itu. Penyebutan nama aksaranya tergantung konteksnya,” katanya.

Aksara Latin



Aksara Latin masuk ke Cirebon berbarengan bangsa kolonial pada tahun 1681 Masehi. Hal itu dibuktikan dengan sebuah naskah zaman perjanjian yang ditandatangani oleh tiga sultan Cirebon, yakni Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Pangeran Wangsakerta.

Aksara Pegon



Aksara ini merupakan aksara arab yang dipergunakan untuk menulis bahasa Cirebon, Jawa dan Indonesia. Dalam bahasa jawa, aksara Pegon berasal dari kata Pego yang memiliki makna *ora lumrah anggonen ngucapake* (tidak mudah diucapkan).

Dalam bentuk tulisan, aksara pegon berjenis tulisan Arab. Namun isi bahasa bisa menggunakan bahasa Cirebon, Sunda, Jawa, Madura dan bahasa daerah lainnya yang hidup di Indonesia. Selain itu, aksara tersebut memiliki 20 huruf, lebih sedikit dari aksara arab yang sebanyak 30 huruf.

Kelebihan lain aksara Cirebon yang tidak dimiliki aksara arab terletak pada jenis huruf konsonannya. Sebagai contoh, dalam aksara Pegon terdapat huruf konsonan (C). Karena itulah aksara ini juga sering disebut aksara arab pegon.

Penggunaan aksara pegon bersifat fleksibel. Bisa untuk penulisan naskah sejarah, kitab keagamaan, buku primbon dan lain-lain.

Di Cirebon, keberadaan aksara pegon dibuktikan salah satunya dengan adanya Naskah Keraton Kacirebonan yang bertulisan huruf Arab Pegon pada 1750-an. Buku tersebut sudah tersimpan di Perpustakaan Nasional. • Muiz

Bahasa Cirebon

Ragam Dialek, Berfilosofi Luhur

Bahasa Cirebon mengandung filosofis yang luhur ketuhanan. Beragam dialektanya pun menjadi penanda peradaban yang maju.



Bahasa Cirebon salah satu dari banyaknya kekayaan Nusantara yang telah ada sejak ratusan tahun. Sebab bahasa tersebut, menjadi identitas kebudayaan Cirebon dan bagian khazanah kebudayaan Indonesia. Sejak abad ke 15 hingga 17 M, bahasa Cirebon ditengarai telah digunakan dalam tuturan warga pesisir utara Jawa Barat.

Secara filosofis, bahasa Cirebon dinilai memiliki sarat transedental. Dalam menyebut subjek misalnya, bahasa Cirebon menggunakan kata: *isun/ingsun* atau *kita* dalam penyebutan lain.

Menurut ahli bahas, *isun*, merupakan salah satu dialek bahasa Jawa kuno yang memiliki arti: saya kosong. Dengan arti lain, tanpa bantuan kekuatan tuhan maka seorang manusia hanyalah kehampaan

atau kosong. Dalam penuturannya, sebagian besar wilayah Cirebon menggunakan bahasa Cirebon. Kecuali sebagian kecil wilayah selatan atau berbatasan dengan Kuningan menggunakan bahasa Sunda.

Sementara itu, bahasa Cirebon terbagi menjadi dua, yakni bahasa bagongan atau disebut padinan, kromo atau bebasan. Adapun penggunaannya menyesuaikan tingkatan kriteria seperti umur, kedudukan, sosial, ekonomi pendidikan dan pengetahuan.

Penutur bahasa Cirebon yang menggunakan bentuk padinan biasanya terhadap lawan bicaranya yang sebaya dan juga terhadap orang yang memiliki status di bawahnya. Contohnya percakapan antar teman dalam pergaulan sehari-hari.

Sebaliknya, kebiasaan penutur bahasa Cirebon menggunakan bentuk bebasan terhadap orang

yang memiliki status lebih tinggi. Karena itu, bahasa bebasan dikenal dengan bahasa halus.

Akademisi IAIN Syekh Nurjati Cirebon Syibli Maufur mengatakan, penggunaan bahasa Cirebon bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai kesopanan dalam tingkah laku. Istilah ini sering dikenal dengan unggah-ungguh. Misalnya, anak berbicara dengan orang tua harus berbahasa bebasan.

Dalam penelitian yang ditulis Supriatnoko pada tahun 2012, masuknya adat unggah-ungguh di Cirebon dipengaruhi oleh kebudayaan Jawa. Tepatnya pada awal abad ke-17, Kerajaan Mataram yang di bawah oleh Sultan Agung, ketika bekerjasama dengan masyarakat Cirebon dalam bidang pemerintahan dan ekonomi serta Cirebon dipaksa menjadi kerajaan jajahan Mataram.

Dialek Bahasa Cirebon

Bahasa Cirebon berbeda dengan bahasa Jawa, meskipun terdengar sekilas memiliki kemiripan dengan bahasa Brebes dan Tegal. Perbedaan tersebut mencolok dalam banyak kosa-kata.

Dalam sebuah penelitian, M Abdul Khak saat menjadi kepala bahasa Bandung (Sekarang Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat) membeberkan, terdapat 75 persen perbedaan kosa kata antara bahasa Cirebon dengan bahasa Jawa Tengah. Sedangkan perbedaan dengan bahasa Jawa Timur mencapai 76 %.

Selain itu, bahasa Cirebon juga memiliki dialek yang beragam. Tercatat ada lima dialek bahasa Cirebon yang biasa digunakan masyarakat Cirebon dalam kehidupan sehari-hari.

Pertama, dialek irebon asli. Dialek ini belum tercampur dengan serapan bahasa lain. Salah satu ciri khasnya adalah kata "isun" untuk menyebut kata "saya". Umumnya dialek bahasa



cirebon asli digunakan oleh masyarakat daerah keraton.

Kedua, dialek dermayon. Salah satu ciri khasnya yakni kata 'reang' untuk menyebut kata isun dalam dialek bahasa cirebon asli. Umumnya dialek ini digunakan oleh masyarakat sekitar perbatasan Cirebon dan Indramayu. Namun juga digunakan sebagian masyarakat pesisir.

Ketiga, dialek Plered dan Lor. Penuturan vokal "o" yang menjadi ciri khasnya. Contohnya penggunaan kata "sira" menjadi "siro" dan gawa menjadi "gawo". Dialek ini digunakan masyarakat Cirebon bagian barat dan utara.

Keempat, dialek gegesik. Dialek ini juga digunakan masyarakat Cirebon bagian barat dan utara, khususnya di sekitar Kecamatan Gegesik. Dialek ini dipercaya lebih halus dengan di-

alih bahasa cirebon asli. Dialek gegesik telah melahirkan banyak dialek dalang Cirebon, karena sering digunakan dalam perwayangan.

Terakhir, dialek jawareh. Dialek ini merupakan gabungan dari separuh bahasa Jawa dan separuh bahasa Sunda. Maka tak heran dialek ini digunakan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan Brebes, Kuningan dan Majalengka.

Karena itu, bahasa Cirebon sebagai warisan budaya menjadi penanda peradaban Cirebon tempo dulu yang maju. Maka tak aneh jika kini keberadaannya telah diakui secara hukum melalui Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003. Perda ini menyebut selain bahasa sunda dan bahasa betawi, bahasa cirebon perlu dipelihara dan dilestarikan. •Muiz

Pegiat Bahasa: Bahasa Cirebon Seolah Dibunuh

Mulai ditinggalkan sebagai bahasa ibu di wilayah perkotaan, perawatan bahasa Cirebon dinilai juga tak dilakukan oleh Pemkab Cirebon. Bagaimana kondisinya?



Kondisi bahasa Cirebon yang menjadi warisan bahasa daerah perlahan dianggap mulai ditinggalkan sebagai bahasa ibu di wilayah perkotaan Cirebon.

Pegiat Bahasa Cirebon Akbar Sucipto mengungkapkan, secara umum kondisi bahasa Cirebon saat ini cukup memprihatinkan. Di wilayah perkotaan atau perbatasan kota, telah jarang digunakan sebagai bahasa keseharian. Sementara di wilayah pedesaan penggunaan bahasa Cirebon masih dipakai dalam interaksi sehari-hari.

“Kalau di lingkungan kota saya merasa yakin banget banyak yang tidak mengenal bahasa Cirebon. Dan itu berdampak di lingkungan perkampung-

ngan kabupaten salah satunya di Sumber. Orangtua tak lagi menggunakan bahasa Cirebon sebagai bahasa ibu maupun untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya,” ungkapnya.

Belum lagi jika melihat para pakar bahasa Cirebon yang semakin berkurang baik karena meninggal maupun minimnya regenerasi.

“Sekarang sudah masuk ke level *emergency* atau darurat, karena tokoh-tokoh dan para ahli Bahasa Cirebon yang semakin sedikit. Walaupun dari sisi akademik masih ada para pakar filologi, namun mereka hanya ahli dalam membunyikan huruf bukan menggunakan huruf,” ungkapnya.

Meski demikian, Akbar menilai, beruntung

pelestarian bahasa Cirebon masih dirawat oleh kelompok masyarakat kultural di kawasan pondok pesantren maupun keraton. Hampir sebagian besar pesantren dan keraton memakai bahasa Cirebon Bebasan dalam percakapan sehari-hari atau pun dalam proses pembelajaran.

“Kita itu tertolong dengan adanya pondok pesantren. Kalau di pondok itu setiap kali bicara dengan kiai atau santri pasti menggunakan bebasan untuk menjaga etika dan sopan santun. Begitu juga di keraton, di mana masih ada aturan adat keluarga kerajaan yang mengharuskan berbicara bahasa bebasan,” jelas Akbar.

Sementara penggunaan bahasa Cirebon selain di dua entitas tersebut, hanya dapat ditemui dalam acara adat atau pagelaran kesenian khas Cirebon. Dalam setiap pertunjukan wayang cepak misalnya, bahasa Cirebon digunakan untuk mengisahkan babad Cirebon.

Pegiat Bahasa Cirebon lainnya sekaligus Founder Komunitas Sketsa Pribumi Imam Miftahul Jannah (MJ) beranggapan, bahasa Cirebon seperti sedang terjun bebas dan tidak ada yang menyelamatkan. Dalam arti, kondisinya tengah dibunuh maupun bunuh diri.

Hal itu terbukti dari nihilnya peraturan daerah sebagai dasar hukum penggunaan bahasa Cirebon dalam lingkup pemerintah. Percakapan bahasa Cirebon tak ditemui dalam rapat pemerintah desa hingga kabupaten.

“Bahasa Cirebon hanya digunakan pada saat pementasan wayang dan acara adat tertentu saja. Di lingkungan pemerintah sepertinya jarang, bahkan mungkin tidak ada. Kalaupun ada mungkin hanya di momen



tertentu, bukan kegiatan rutin,” ujar Imam.

Imam pun berpendapat, akan lebih baik jika dalam setiap rapat pemerintah baik desa hingga kabupaten penggunaan bahasa Cirebon mulai dilakukan. Ditambah dengan wajib berbahasa Cirebon seminggu sekali.

“Saya mengibaratkan demikian seperti dibunuh atau bunuh diri. Kita sebagai masyarakat Cirebon seakan membunuhnya, dari mulai malas mempelajari bahasa Cirebon hingga tidak adanya hukum yang mengatur pelestarian bahasa Cirebon,” ujar Imam.

Pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam upaya pelestarian bahasa daerah. Sebagaimana amanat Undang-Undang, kata Imam, Pemerintah

Daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.

Meski demikian, Imam mengakui tugas menjaga bahasa Cirebon bukan hanya pemerintah, melainkan seluruh masyarakat Cirebon khususnya para orangtua juga memiliki tanggungjawab untuk memastikan warisan leluhur tersebut tetap ada dan terjaga.

“Kepada orang tua juga seharusnya membantu mengenalkan bahasa daerah kepada anak-anaknya sejak kecil. Kalo bahasa Indonesia saya rasa dengan sendirinya anak akan bisa, entah itu belajar dari TV ataupun saat di sekolah nanti,” tandasnya. •Par

Penilaian Publik: Minim Pelestarian



Hasanudin
Mahasiswa

Penggunaan Bahasa Cirebon di kalangan generasi muda saat ini kian berkurang, mungkin ada rasa malu atau takut dibilang kampung. Padahal bahasa Cirebon adalah identitas kita, yang harusnya menjadi kebanggaan bersama. Sebagaimana warga Pasundan yang bangga dan terbiasa menggunakan bahasa Sunda dalam kesehariannya.

Bahasa Cirebon saat ini sudah mulai tersisih, apalagi di daerah perkotaan. Kehadiran sosial media menjadi salah satu pengaruh terhadap perubahan bahasa daerah tak lagi digandrungi oleh mahasiswa.



Rizal
Mahasiswa



Siti
Pegawai

Makin lama mungkin makin jarang yang berbicara bahasa Cirebon. Di sekitar daerah yang saya tinggal para orang tua kebanyakan berinteraksi dengan anaknya menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan para pembeli saat ini lebih menyukai berbicara bahasa Indonesia. Mas, beli bukan Kang tuku kang.

Penggunaan bahasa asli di Cirebon setahu saya memang belum menyeluruh, seperti di daerah kota, hampir semua menggunakan bahasa Indonesia. Saya hanya melihat sesekali orang yang kemudian menggunakan bahasa asli Cirebon dalam kesehariannya.



Rinni
Guru



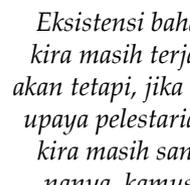
Julfa
Kepala Sekolah

Sebagai warga pendatang, Cirebon ini sangat berbeda, saya melihat Cirebon adalah salah satu daerah yang cukup dinamis dalam hal komunikasi. Saya seringkali melihat para warga sekitar berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Tapi saya meyakini, mereka bukan tidak bisa, tetapi memang menyesuaikan dengan perkembangan.



Tia
Pegawai

Ibarat kata “jauh panggang dari api” yang kita dengar di Cirebon hari ini lebih cenderung ke bahasa pergaulan, sudah bercampur-baur dengan bahasa dari daerah lain. Ini mengindikasikan bahasa asli Cirebon sendiri sudah hampir punah.



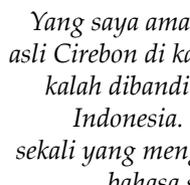
Maman
Dosen

Eksistensi bahasa asli Cirebon saya kira masih terjaga bagi masyarakat, akan tetapi, jika kita bicara mengenai upaya pelestariannya, itu yang saya kira masih sangat minim. Sederhananya, kamus bahasa Cirebon saja kita enggak punya



Muhaimin
Kuwu Sindang Mekar

Saya melihat pemahaman generasi penerus kita akan bahasa asli Cirebon mulai menyusut. Mayoritas mereka tidak begitu paham dan mengerti tentang bagaimana cara berinteraksi dan menggunakan bahasa daerah yang sesuai.



Mastur
Kuwu Kecomberan

Yang saya amati, popularitas bahasa asli Cirebon di kalangan pelajar masih kalah dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Karena setahu sedikit sekali yang menggunakannya sebagai bahasa sehari-hari di sekolah.



Sukardi
Kuwu Karangwangi

Jika bicara mengenai Bebasan atau bahasa Cirebon. Saya lihat memang ada penurunan dari tahun ke tahun. Para orangtua seperti tidak lagi mengajarkan ke anak-anak mereka.

Tak Miliki Kurikulum Lokal Hingga Minim Pengajar

Sulitnya siswa menangkap mapel Bahasa Cirebon ditengari kurikulum yang tak sesuai dengan kebutuhan. Juga rendahnya kompetensi pengajar. Mengapa?



Bahasa Cirebon menjadi salah satu mata pelajaran (mapel) muatan lokal (mulok) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon mewajibkan seluruh jenjang SD dan SMP menambah mapel Bahasa Cirebon satu kali pertemuan dalam seminggu.

“Memang kita sudah instruksikan seluruh sekolah SD dan SMP di bawah kita untuk wajibkan mapel bahasa Cirebon minimal 2 jam untuk SMP dan 1 jam SD sekali pertemuan dalam seminggu,” ujar Kasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMP Disdik Kabupaten Cirebon Muhammad Rukhyat Zain.

Menurutnya, secara teknis, Disdik Kabupaten Cirebon hanya memfokuskan dua kurikulum mulok: Bahasa Sunda dan Cirebon. Namun tak dipungkiri, jika sekolah juga berhak menambah mulok se-

suai kebutuhan.

“Nah kalau waktu atau hari mapel Bahasa Cirebon diserahkan ke sekolah yang mengatur. Begitu pun dengan gurunya,” tambahnya.

Meski demikian mapel Bahasa Cirebon dalam sekali pertemuan dinilai belum optimal karena tak membuat siswa cepat memahami bahasa Cirebon. Di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) KH Abdurrahman Mahmud, Desa Mertapadawetan, Kecamatan Astanajapura misalnya, rata-rata siswa lancar berbahasa Cirebon Padinan. Tetapi tidak dengan bahasa Cirebon Bebasan.

“Sebagian besar siswa hanya memahami sedikit kosa-kata bahasa Cirebon Bebasan. Misalnya kata *sampun* (sudah) karena sering mereka ucapkan ketika selesai belajar,” ujar Munawaroh, Guru SDIT Abdurrahman.



Jadwal pelajaran bahasa Cirebon yang hanya 1 jam untuk tingkat SD, kata Munawaroh, dirasa kurang untuk bisa dipahami oleh para siswa. Selain itu, belum adanya standar kurikulum Bahasa Cirebon produk Pemerintah Kabupaten Cirebon juga dianggap menjadi penyebab. Sementara ini, yang diajarkan di sekolah masih menggunakan buku terbitan milik pemerintah provinsi.

“Saya ngajar Bahasa Cirebon ke siswa pakai buku “Belajar Basa Lan Sastra Cerbon-Dermayu” yang dibuat oleh Disdik Provinsi Jawa Barat,” ungkap

Munawaroh.

Sejumlah Budayawan Cirebon ditengarai tengah berinisiasi membuat buku Bahasa Cirebon yang akan ditawarkan ke pemerintah daerah sebagai kurikulum pembelajaran.

“Saya sempet jadi tim penulisan buku bahasa Cirebon bersama Pak Salim, Mas Imam Pa Akbar Sucipto dan lain-lain. Tetapi saya tidak melanjutkan karena bentrok dengan kegiatan yang lain,” ujar Akademisi IAIN Syekh Syibli Maufur.

Di luar itu, keterbatasan guru yang memiliki kompetensi ung-

gul dalam Bahasa Cirebon juga dianggap menjadi penyebab para siswa di sekolah tak mudah menerima pelajaran.

“Bahasa Cirebon ini penting diajarkan di sekolah. Sayangnya, hingga kini belum ada guru lulusan prodi bahasa Cirebon. Sebab belum ada universitas yang membuka prodi bahasa Cirebon. Bagi saya itu juga penyebab,” kata Syibli.

Oleh karenanya, Syibli juga berupaya mengatasi kekurangan guru bahasa Cirebon dengan menambah mata kuliah (MK) Budaya dan Bahasa Cirebon bagi mahasiswa prodi PGMI IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebanyak 8 satuan kredit semester (sks).

Kondisi tersebut juga disadari Rukhyat. Ia mengaku kesulitan mendapatkan guru bahasa Cirebon sehingga pengambilan guru bahasa Cirebon diserahkan kepada kebijakan sekolah masing-masing.

Upaya melahirkan sarjana bahasa Cirebon, Rukhyat sejatinya telah berkoordinasi dengan Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) agar perguruan tinggi membuat program studi bahasa Cirebon. Namun hingga kini belum ada satu pun perguruan tinggi yang mau merealisasikan.

“Sebenarnya ada sih universitas yang ingin membuka prodi bahasa Cirebon, tapi mereka khawatir sepi peminat,” ungkapnya.

Meski demikian Rukhyat berharap, pelestarian bahasa Cirebon melalui pembelajaran di sekolah tetap harus dilakukan karena dapat meningkatkan karakter siswa. Ia pun menghimbau para pengajar mengajarkan mapel Bahasa Cirebon sampai tahap budi pekerti siswa.

“Contohnya ketika guru memanggil siswa, siswa diajarkan untuk menjawab enggih dengan badan menunduk. Itu menandakan siswa tidak hanya memahami arti bahasa bebasan tetapi juga sikap dalam berkomunikasi,” pungkasnya. •Muiz

Mati Suri Balai Bahasa

Lembaga bahasa Cirebon tak lagi aktif. Padahal keberadaannya begitu penting sebagai penjaga pelestarian bahasa Cirebon. Mengapa?



Lembaga Basa lan Sastra Cirebon (LBSC) semula merupakan wadah yang merawat keberadaan bahasa maupun aksara Cirebon. Berbagai kegiatan diselenggarakan dari seminar, kajian dan riset. Diisi oleh para pegiat budaya dan sastra, LBSC menjadi lembaga penjaga bahasa daerah yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Namun hal itu tak berlangsung lama. Setelah meninggalnya salah satu pengurus LBSC, seluruh program pengembangan bahasa Cirebon di LBSC seolah terhenti. Akibatnya upaya pelestarian bahasa Cirebon melalui strukturalisasi tak lagi dilakukan.

“Kita menyayangkan semenjak almarhum Pak Noer meninggal, LBSC menjadi mandek dan program-program yang telah dirumuskan berhenti,” ujar Ketua Dewan Kesenian Cirebon Akbar Sucipto.

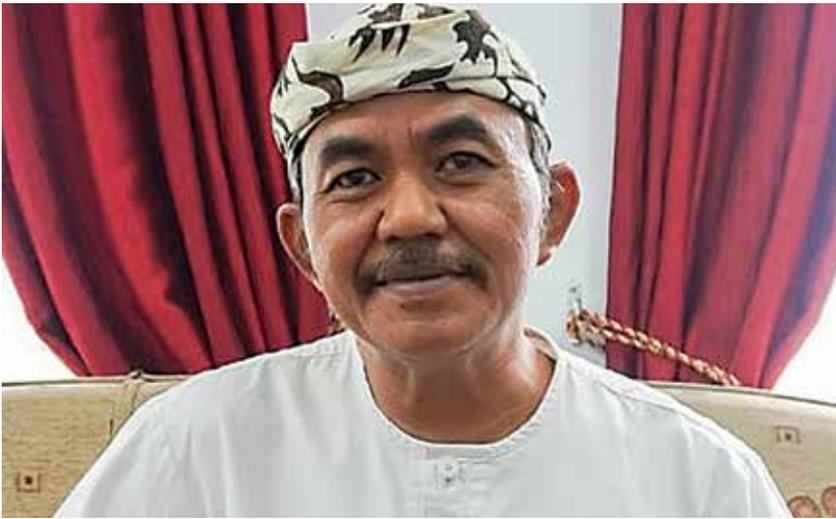
Beberapa faktor penyebabnya, bahasa daerah Cirebon tak lagi mendapat dukungan Pemerintah

Kabupaten Cirebon maupun Pemkot Cirebon. Selain itu, kata Akbar, sulitnya mencari tenaga pengajar yang kompeten berbahasa Cirebon.

Pegiat Budaya dan Sastra Cirebon Raden Chaidir Susilaningrat berpendapat perubahan sosial masyarakat yang tak lagi menganggap penting bahasa Cirebon sebagai bahasa ibu, menjadi kekhawatiran bahasa Cirebon akan dilupakan generasi muda di kemudian hari. Di luar itu, perkembangan teknologi yang cepat telah melahirkan kebiasaan baru termasuk dalam berbahasa.

“Zaman dulu petani menggarap sawah menggunakan kerbau, tapi sekarang sudah menggunakan mesin. Semua jadi lebih mudah. Saya rasa fenomena sosial ini juga yang mempengaruhi masyarakat mengalami perubahan dalam berbahasa,” jelas Chaidir.

Sebagai pegiat budaya, ia pun waswas meli-



hat fenomena tersebut. Cirebon dikenal dengan wilayah yang memiliki banyak budaya, tidak hanya ritual adat tetapi memiliki bahasa yang khas. Sehingga menyedihkan pasifnya LBSC yang dapat berakibat pelestarian bahasa Cirebon semakin tidak terkendali.

“Dulu di Cirebon LBSC menjadi corong penjaga bahasa Cirebon. Tapi semenjak Pak Nurdin wafat pada tahun 2020 kemarin, lembaga tersebut mulai tidak aktif. Saya rasa ini juga yang menjadi faktor pelestarian bahasa Cirebon tidak terkontrol,” tuturnya.

Menurutnya, keberadaan lembaga bahasa sangat penting untuk pelestarian bahasa daerah. Dengan adanya lembaga bahasa, setidaknya menjadi wadah dari produk-produk para pegiat budaya.

“Jadi sangat disayangkan jika lembaga bahasa Cirebon dibiarkan tidak aktif begitu saja,” ujarnya.

Ia pun mengungkapkan, sering berdiskusi bersama para pegiat bahasa dan budaya untuk bersama-sama membenahi LBSC dengan membuat kegiatan bertemakan pelestarian bahasa dae-

rah Cirebon.

“Dalam setiap pertemuan, kadang saya ajak teman-teman untuk hidupkan lagi lembaga bahasa Cirebon. Dengan kegiatan seminar, lomba pidato atau *standup* bahasa Cirebon,” ungkap Chaidir.

Oleh karenanya ia berharap LBSC dihidupkan kembali. Pemerintah harus mulai bertindak serius mengaktifkan lembaga tersebut.

“Banyak jika kita bahas tentang bahasa daerah. Tapi sederhananya harus ada perda khusus bahasa. Selain lembaga bahasa yang harus aktif lagi,” tandasnya.

Sejauh ini, Imam MJ, Pegiat Bahasa sekaligus Founder Komunitas Sketsa Pribumi menilai pemerintah kurang tegas dalam upaya pelestarian bahasa daerah.

“Yang saya tahu peraturan untuk pelestarian bahasa daerah itu masuk dalam 5 pasal Perda kebudayaan, dan menurut saya itu kurang efektif, karena dalam pelestarian bahasa itu akan ada revitalisasi bahasa daerah, rekonstruksinya, kemudian dokumentasi,” tegas Imam.

Imam juga berharap agar dinas yang bertanggungjawab melestarikan bahasa Cirebon bisa lebih membuka ruang bagi para pegiat bahasa yang berjuang melestarikan bahasa daerah. Pasalnya, sejauh ini, ia melihat perhatian dinas terhadap komunitas dan pegiat budaya dianggap kurang.

“Saya berharap Disbudpar bisa memberi respon yang serius pada komunitas atau pegiat budaya yang berniat untuk melestarikan bahasa daerah. Jika Disbudpar bisa berjalan beriringan dengan komunitas atau pegiat bahasa mungkin akan lebih mudah untuk sama-sama mengawal bahasa Cirebon,” jelas Imam. •Par

Senarai Asa Merawat *Basa Cerbon*

Disbudpar berjanji hidupkan kembali peran Lembaga Bahasa Cirebon yang sempat vakum, sementara Disdik upayakan pendirian program studi Bahasa Cirebon di perguruan tinggi.



Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cirebon Amin Mughni berjanji berupaya menghidupkan kembali balai Lembaga Basa lan Sastra Cirebon (LBSC), agar keberadaan bahasa Cirebon bisa tetap tarjaga dan lebih dikenali masyarakat.

“Lembaga bahasa Cirebon sudah ada sejak zaman Pak Subandi, almarhum Pak Nur, Mas Supari dan kawan-kawan. Maka itu lembaga ini harus digerakkan lagi. Sekarang lagi digodok terus soal mengaktifkan lagi” ujar Mughni.

Menurutnya, banyak kegiatan yang akan dilaksanakan di LBSC jika lembaga ini aktif kembali. Salah satunya, program belajar bahasa Cirebon untuk masyarakat umum.

Selain itu, LBSC juga akan dijadikan wadah bagi para pegiat bahasa membuat karya. Misalnya, pem-

buatan kamus lengkap bahasa Cirebon yang mudah dipahami masyarakat.

Selanjutnya, Disbudpar juga bekerjasama dengan Disdik Kabupaten Cirebon soal pematangan penerapan kurikulum Bahasa Cirebon untuk sekolah. Ia memastikan akan menyediakan kamus lengkap bahasa bebasan sebagai bahan ajar para guru.

Di luar itu, upaya lainnya yakni penerapan program wajib berbahasa Cirebon seminggu sekali di lingkungan sekolah. Penerapan ini dilakukan oleh guru terlebih dahulu sebelum para siswa.

“Ayo kita unggah-ungguh dengan berbahasa bebasan di sekolah. Jika siswa SD sampai SMA terbiasa menerapkan pengetahuan dasar bahasa bebasan, secara otomatis penerapan di masyarakat juga akan terbiasa,” jelas Mughni.

Sementara itu, Kasi Tenaga Pendidik dan Kependi-



dikan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon Muhamad Rukhyat Zain mengatakan, untuk menyelesaikan persoalan minimnya tenaga pengajar kompeten berbahasa Cirebon, ia akan mendorong perguruan tinggi melahirkan program studi Bahasa Cirebon.

Sekalipun mapel muatan lokal (mulok) bahasa Cirebon telah lama menjadi mulok wajib tingkat SD dan SMP, keberadaan guru lulusan bahasa Cirebon tak kalah penting.

“Supaya orang tertarik pada prodi bahasa Cirebon di kampus, kita perjuangkan dan mengutamakan para lulusan sarjana Ba-

hasa Cirebon bisa cepat menjadi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K),” ujarnya.

Untuk mendorong universitas membuka program studi Bahasa Cirebon, kata Mughni, tentu tidaklah mudah. Setidaknya harus terlebih dahulu mengajukan Naskah Akademik (NA) yang menjelaskan pentingnya prodi.

Meski demikian, ia optimistis pendirian prodi Bahasa Cirebon dapat terwujud. Apalagi pelestarian bahasa Cirebon telah diikat oleh Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Bahasa,

Sastra dan Aksara Daerah.

“Tidak ada yang tidak mungkin ketika pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersinergi. Apalagi di pusat program bidang pendidikan dan kebudayaan menyatu di bawah Kemendikbud,” kata Mughni.

Sementara itu, DPRD Kabupaten Cirebon juga tengah menginisiasi lahirnya Perda Bahasa Cirebon. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Drs Subhan mengatakan, DPRD berkeinginan Kabupaten Cirebon memiliki perda khusus agar pelestarian bahasa daerah benar-benar tercapai.

“Sekarang masih embrio, kita di legislatif sudah mendiskusikannya. Semoga segera bisa kita wujudkan perda bahasa Cirebon,” jelas Subhan.

Menurutnya, perawatan bahasa Cirebon tak cukup bila hanya mengandalkan dari bahan ajar saat sekolah. Melainkan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, jika perda bahasa sudah ada tentu akan mampu mengatur penggunaan bahasa Cirebon bagi instansi maupun sekolah.

“Kalau ada Perda minimal payung hukum untuk mengatur para pejabat, guru menggunakan bahasa Cirebon minimal seminggu sekali bisa kita lakukan,” tambahnya.

Selain itu, perda juga akan membahas dan mengatur lembaga yang merawat bahasa Cirebon.

“LBSC memang sempat ada tapi belum punya payung hukum kuat setahu saya. Makanya keinginan para pegiat untuk melahirkan Perda saya sepakat. Kalau sudah ada perda, peran LBSC sebagai wadah pembelajaran dan pengembangan bahasa Cirebon akan dapat hidup,” pungkasnya. •**Muiz**

Harapan Publik: Perlu Ketegasan Kebijakan Pelestarian



Abraham
Pengusaha

Perlu peran semua pihak dalam melestarikan bahasa Cirebon. Tak terkecuali Pemda yang diharapkan bisa membangun program studi di perguruan tinggi atau fakultas khusus Sastra Bahasa Cirebon, sehingga melahirkan sarjana-sarjana bahasa Cirebon yang menghasilkan SDM berkualitas sebagai pengajar mata pelajaran Bahasa Cirebon.

Upaya yang tetap harus dilakukan yakni edukasi. Sejauh ini Pemerintah Daerah belum terlihat mengkampanyekan pentingnya merawat bahasa Cirebon. Mungkin mereka masih belum merasa ini sebagai urgensi.



Fanani
Mahasiswa



Agus
Pedagang

Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon harus waspada, jangan sampai apa yang menjadi identitas baik itu bahasa atau budaya Cirebon semakin pudar. Jadi mengenalkan bahasa Cirebon kepada anak cucu setiap warga Cirebon harus dikampanyekan.

Saya kira salah satu upaya adalah dengan membiasakan bahasa Cirebon sebagai bahasa sehari-hari. Kita juga wajib mengenalkan bahasa Cirebon kepada anak, istri, suami dan orang-orang di sekeliling kita.



Lutfi
Guru



Taufik
Santri

Untuk upaya pelestarian, saya kira Cirebon bisa mencontoh daerah lain yang lebih intensif menggunakan bahasa daerah mereka seperti Bandung misalnya, atau Yogyakarta yang dalam kesehariannya banyak menggunakan bahasa daerah mereka.



Jajat Sudrajat
Budayawan

Bahasa Cirebon itu bukan sekadar tutur kata, akan tetapi soal tata krama atau anggah-ungguh. Untuk menjaganya, saya mendorong perlu adanya payung hukum seperti Perbup atau Perwali yang dapat mendasari upaya pelestariannya. Sekaligus sebagai bentuk keseriusan pemerintah menjaga bahasa daerah Cirebon.

Pentingnya ketersediaan buku-buku bacaan yang berbahasa Cirebon asli. Di luar itu, kewajiban dan optimalkan muatan lokal bahasa Cirebon di sekolah.



Rifki
Dosen



Gunawan
Kuwu Ciperna

Selain harus mengintensifkan dialog sehari-hari dengan berbahasa Cirebon, saya kira perlu juga membekali generasi muda dengan pengetahuan bahasa daerah Cirebon sejak SD hingga SMA, sebagai bentuk komitmen agar bahasa Cirebon tetap terjaga.

Kayanya di sekolah juga harus ada pembiasaan menggunakan bahasa Cirebon di salah satu hari. Semua guru dan siswa bebasan atau bahasa Cirebon halus.



Ayyuwbi
Pelajar



Hj. Solihah
Pengasuh Pesantren

Sebagai langkah awal, Kita bisa mulai dari lingkup terkecil seperti keluarga. Membiasakan orang sekitar kita menggunakan Bebasan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian mewajibkan penggunaan Bebasan di hari-hari tertentu bagi seluruh lembaga maupun instansi di Cirebon.

#	Unit	Nomor Telepon
1	Polresta Kab. Cirebon	0231-204466
2	Polres Cirebon Kota	0231-205179
3	Pemadam Kebakaran Kab. Cirebon	0231-638249
4	Pemadam Kebakaran Kota	0231-484113
5	Ambulance	0231-206330 ext.1042
6	Pos SAR Cirebon	0231-8356347
7	Unit Transfusi Darah PMI Kota	0231-204964
8	Unit Donor Darah PMI Kota	0231-201003
9	Pengaduan PLN Kota Cirebon	0231-236551
10	Pengaduan Gangguan PDAM	0231-244222
11	PDAM Tirtajati (Sumber)	0231-321457
12	PDAM Kota Cirebon	0231-204800
13	Pengaduan Gas Kota Cirebon	0231-203323
14	Terminal Bis Harjamukti	0231-248902
15	Stasiun Kejaksan	0231-210444
16	Stasiun Parujakan	0231-202577
17	RSUD Arjawinangun	0231-358335 / 359090
18	RSUD Gunung Jati	0231-206-330
19	RSUD Waled	0231-661126; IGD: 0231-661275
20	RSIA Sumber Kasih	0231-203815
21	RS Ciremai	0231-238335
22	RS Hasna Medika	0231-343405; IGD: 0231-8825010
23	RS Mitra Plumbon	0231-323100
24	RS Pelabuhan	0231-230024 / 205657
25	RS Permata	0231-8338877 / 8338899; IGD 0231-8338881
26	RS Pertamina Klayan	0231-224797 / 224798; IGD: 08112433338
27	RS Putra Bahagia	0231-485654
28	RS Sumber Urip	0231-8302689
29	RS Sumber Waras	0231-341079

Perayaan Hari Jadi ke 540 Penanda Kebangkitan Kesenian

Puncak perayaan hari jadi Kabupaten Cirebon ke 540 digelar terbatas di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon. Seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) hingga jajaran kepala dinas seirama memakai beskap dan kebaya khas Cirebon khidmat mengikuti rapat paripurna yang dibacakan dengan bahasa Cirebon.

Sebelumnya, rangkaian perayaan hari jadi telah dilakukan dengan berbagai kegiatan diskusi, vaksinasi, lomba olahraga hingga doa bersama.

Sudah dua tahun keriaan hari jadi hanya dilakukan secara sederhana. Meski demikian, nuansa khuyuik dan bahagia masih terasa saat melihat para seniman, budayawan bergantian menampilkan dengan gagah kesenian khas Cirebon di penghujung kegiatan. •Soy





Diikat Perda, Dijaga Bersama

Para pegiat bahasa serta akademisi berrpendapat agar bahasa Cirebon tetap terjaga harus ada upaya yang dilakukan secara seirama. Apa langkahnya?



Akademisi IAIN Syekh Nurjati Cirebon Syibli Maufur mengatakan, agar bahasa Cirebon bisa tetap lestari dan tidak punah, maka harus ada keseriusan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam merawatnya.

Menurutnya, banyak upaya yang dapat dilakukan, salah satunya dengan mengkampanyekan kegiatan literasi budaya dan bahasa Cirebon. Terutama bagi anak-anak agar bahasa Cirebon dapat dikenal sejak dini.

“Khususnya kepada pelajar SD sederajat. Kegiatan yang bertemakan bahasa Cirebon harus lebih sering diadakan,” kata Syibli.

Kedua, perlunya penetapan hari berbahasa Cirebon yang mengharuskan seluruh elemen di Kabupaten Cirebon dari pemerintah, sekolah dan lembaga swasta

berbicara dengan bahasa Cirebon selama sehari.

“Akan menarik, jika itu terjadi. Warga berkomunikasi dengan pegawai bank misalnya, harus menghafal lebih dulu bahasa Cirebon. Tukang parkir memarkir kendaraan dengan bahasa Bebasan. Itu kan unik,” tuturnya.

Selanjutnya tak kalah penting, yakni simbolisasi petunjuk arah di sejumlah kawasan yang menambahkan keterangan bahasa Cirebon. Petunjuk arah lebih sering dilihat dan dicari sehingga dengan tidak sadar akan berpotensi mudah dihapal.

“Bahkan petunjuk benda, arah atau pengumuman, kalau perlu juga ditambahkan dengan keterangan bahasa Cirebon,” jelasnya

Sementara itu, Pegiat Budaya Cirebon Raden Chaidir Susilaningrat berharap Pemerintah Kabu-



paten Cirebon segera mengaktifkan kembali Lembaga Balai Bahasa *lan* Sastra Cirebon (LBSC) yang semula menjadi wadah para pegiat bahasa.

“Dulu lembaga ini sempat aktif. Namun karena ketuanya sudah meninggal, statusnya kini vakum dan belum ada yang meneruskannya,” jelas Chaidir.

Chaidir juga meminta kepada pemerintah agar pelestarian budaya dan bahasa Cirebon diikat dengan lahirnya peraturan daerah (perda).

Di sisi lain, Chaidir mengajak para pegiat dan masyarakat juga

ikut andil melestarikan dengan membuat sebuah karya berbahasa Cirebon yang bisa berguna untuk generasi muda. Seperti, buku, tulisan atau film pendek yang diterbitkan di media untuk memperkenalkan bahasa Cirebon.

“Ayo kita bikin sesuatu, misalnya bikin kamus bahasa Cirebon atau saluran media yang isinya tentang bahasa Cirebon,” kata Chaidir.

Senada itu, Pegiat Bahasa Cirebon Doddy Yulianto berharap bahasa Cirebon selalu digaungkan baik secara ucapan maupun tulisan. Oleh karenanya,

local genius yang mesti dihidupkan adalah membiasakan diri berbahasa Cirebon. Baik menggunakan bahasa Bagongan maupun Bebasan. Seiring itu, dunia literasi juga harus didukung dengan memperbanyak bahan bacaan bahasa Cirebon.

“Meski para siswa mendapat bekal pelajaran bahasa Cirebon saat di sekolah, bagi saya itu tak cukup. Pengajaran di sekolah memang penting, tapi apakah itu efektif. Sementara kalau kita lihat mata pelajaran Bahasa Cirebon ini porsi nya sangat sedikit. Makanya perbanyak bacaan juga harus dilakukan,” ujar Doddy.

Belum lagi jika melihat bagaimana fakta para pengajar bahasa Cirebon saat ini yang berbeda dari latar belakang pendidikannya.

“Itu karena memang karena belum adanya prodi bahasa Cirebon. Jadi enggak aneh kalau gurunya saja kadang enggak kompeten. Bahkan seringkali *sing penting ana sing gelem*,” ungkapnya.

Oleh karena itu, agar upaya menjaga bahasa bisa terwujud, harus ada daya dukung terlebih dahulu dari legislatif dan eksekutif dengan bersama-sama membentuk peraturan daerah untuk menjaga keberlangsungan *basa Cerbon*.

Menurutnya, kehadiran Perda telah dinantikan oleh seluruh pegiat budaya dan bahasa di Cirebon. Dengan adanya payung hukum, maka semua akan diatur dari pendidikan, lembaga maupun kebijakan lainnya.

“Sehingga sekali lagi, selain pentingnya dibiasakan berbahasa Cirebon dalam keseharian di berbagai tempat maupun platform dan tak perlu merasa malu. Keberadaan Perda sebagai pengikat menjadi penting sebagai langkah awal. Itu pun kalau serius,” pungkasnya. •Kus

Belajar dari Indramayu Berhasil Kuatkan Peran Lembaga Bahasa

Upaya pelestarian bahasa Dermayu dinilai berhasil setelah memperkuat keberadaan LBSD yang sukses selenggarakan kongres bahasa Dermayu pertama untuk penetapan kosakata. Bagaimana bisa?



Salah satu objek kemajuan budaya sebagaimana amanat Undang-Undang yakni terjaganya bahasa. Baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah.

Kabupaten Indramayu merupakan salah satu daerah yang menggunakan bahasa khas daerah. Keberadaan lembaga bahasa di Indramayu, dinilai berhasil dalam menjaga eksistensi bahasa Dermayu.

Sekretaris Lembaga Basa dan Sastra Dermayu (LBSD) Saptaguna mengatakan, lembaga bahasa di Indramayu masih cukup aktif dalam mengawal pelestarian bahasa. Menurutnya, LBSD seringkali melakukan pertemuan bersama para pegiat budaya, seni untuk membahas keberlangsungan bahasa Dermayu.

Hampir sebulan sekali, LBSD Indramayu intens melakukan forum diskusi perkembangan bahasa daerah serta merancang program perawatan bahasa.

Selain itu, LBSD Indramayu juga membuat karya tulis berbahasa daerah, seperti cerpen, puisi hingga novel yang didistribusikan untuk sekolah. Setiap peringatan bahasa di bulan Februari, tak lupa LBSD ikut memeriahkannya dengan mengadakan pentas berbahasa daerah: menyanyi, pembacaan puisi, *stand up comedy*.

“Upaya itu kami lakukan agar keberlangsungan bahasa Dermayu yang begitu ragam tetap dikenali dan terjaga oleh generasi muda,” jelas Saptaguna.

Menurutnya, LBSD hanya menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan maupun Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah.

“Itu yang menjadi dasar hukum kami untuk mau bergerak mengembangkan bahasa di daerah,” tuturnya.



Belum lama ini, mereka telah berhasil menyelenggarakan kongres bahasa Dermayu yang pertama untuk menetapkan kosa-kata hingga penentuan kata baku. Upaya tersebut berangkat dari keresahan para pegiat LBSD yang melihat dialek-dialek yang ada di Indramayu belum terawat.

“Makanya agar bisa tetap jaga kita perlukan pertemuan besar dengan tokoh-tokoh dan pihak yang berkepentingan untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan perihal bahasa Indramayu, seperti tentang tata bahasa (Paramasastra), kesusastraan dan

pembakuan ejaan dalam bahasa dialek Indramayu,” jelasnya.

Keseriusan dalam melestarikan bahasa Dermayu, kata Sapta, tak luput dari peran LBSD yang merupakan lembaga bahasa resmi dengan dukungan pemerintah daerah.

“Pentingnya sebuah lembaga punya legalitas yang terakta notariskan semacam yayasan dengan support pemerintah daerah. Sehingga dapat memasifkan kegiatan-kegiatan yang bersifat pelestarian bahasa,” kata Sapta.

Meski begitu, Sapta mengungkapkan, selain mengaktifkan

keberadaan LBSD, tak kalah penting yakni mengedukasi masyarakat untuk mengajarkan bahasa daerah sejak kecil. Oleh karenanya, saat ini LBSD telah merencanakan untuk membuat kurikulum pendidikan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

“Kita sudah merencanakan pembuatan materi atau kurikulum di lembaga pendidikan. Yang nanti akan dicetak dan disebar di sekolah mulai dari SD, SMP, sampai SMA,” ungkapnya.

Sementara guna mengimbangi perubahan sosial, LBSD juga membuat karya bahasa daerah yang dipublikasi melalui media sosial. Puluhan konten telah diproduksi dari video, tulisan dan infografis.

“Sampelnya sudah banyak, di youtube saja sudah banyak konten dengan bahasa jawa ngapak. Ini yang seharusnya dilakukan oleh generasi muda yang didukung oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Bagi Sapta dan seluruh pengurus LBSD, sangat baik jika masyarakat mempelajari bahasa asing dan bahasa nasional. Namun jangan sampai lupa terhadap jati diri. Semua daerah, tentu memiliki bahasa daerah yang sejak turun menurun sudah ada. Hal itu merupakan warisan leluhur dan identitas seseorang yang harus dijaga.

Selain itu, dengan tetap menggunakan bahasa daerah, secara tidak langsung, kata Sapta, seseorang akan tahu etika dalam bertutur kata.

“Kekhasan berbahasa itu yang menjadi kekayaan kita. Salah satu cara yang paling mudah mengetahui identitas seseorang dapat dilihat dari bahasa atau pun dialek tutur katanya,” pungkasnya. •Suf

Jamur Krispi Mushi Bersiap Tembus Pasar Global

Awalnya, jamur tiram milik Lia sulit terjual hingga ia mengolahnya menjadi kudapan krispi yang sukses di retail modern. Selanjutnya, ia tengah bersiap ekspor Mushi ke pasar global. Bagaimana bisa?



Memulai usaha tentu bukanlah hal mudah, banyak lika-liku yang harus dilewati. Tantangan dan halangan pun menjadi hal yang tak lepas dari kisah perjalanan pemilik usaha jamur krispi Mushi Lia Amalia yang ia dirikan sejak 2018 silam.

Tak banyak yang tahu jika kudapan jamur krispi Mushi telah sukses di retail modern dan toko oleh-oleh khas Cirebon. Olahan berbahan dasar jamur tiram ini, bukan hanya berjenis makanan ringa melainkan juga melahirkan beberapa jenis pro-

duk jamur lainnya, seperti jamur krispi, krupuk jamur, kaldu jamur bubuk, dan tepung jamur.

Berawal dari rasa empatinya terhadap para petani jamur yang sulit menjual hasil panen, Lia pun begitu gelisah. Lia yang juga seorang petani jamur hanya berharap jerih payahnya menanam jamur bisa dirasakan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Dulu setiap kali musim panen para petani kebingungan untuk menjual. Sementara sifat jamur mudah membusuk jika tak segera diolah. Saya sebagai sesa-

ma petani jamur juga merasakan bagaimana sulitnya memasarkan jamur saat itu,” ungkap Lia.

Produksi jamur yang berlimpah ternyata tak sebanding dengan permintaan pasar. Lia pun tak ingin rugi. Keadaan itu, menuntut Lia harus memutar otak agar hasil panen melimpahnya tak sia-sia.

Di tahun 2018, bermodal kegemarannya memasak, Lia bereksperimen mengolah jamur tiram menjadi makanan ringan. Ide sederhana yang terlintas di benak Lia saat itu adalah membuat jamur krispi dalam bentuk kema-



san. Baginya mudahnya pembuatan jamur krispi menjadi alasan ia sangat yakin untuk mengeksekusi ide bisnis tersebut.

“Memang dasarnya saya suka memasak, jadi secara autodidak saya coba membuat jamur krispi waktu itu. Pembuatannya tidak sulit, dan bahan-bahannya juga cukup mudah didapatkan. Setelah itu saya coba keluarga dan tetangga saya nyicipi ternyata suka. Mulai saat itu saya seriusi hingga sekarang,” tuturnya.

Di rumah kontrakannya yang

terletak di Desa Karangwangi, Kecamatan Karangwareng Mushi pertama kali terlahir. Seiring berjalannya waktu, Mushi mulai dikenal oleh masyarakat. Lia terus mempromosikan Mushi dari rumah ke rumah hingga dipasarkan di retail modern setelah menempuh persyaratan. Untuk mengikuti perkembangan zaman, Lia juga menjual Mushi di beberapa *marketplace*.

“Sampai sekarang, kurang lebih sudah hampir 3 tahun Mushi juga dijual di Alfamart

dan Indomart. Ada juga distributor dan reseller. Bisa juga didapatkan di Blibli.com, yang sudah mendapatkan *top rated* karena penjualannya yang meningkat,” kata Lia.

Untuk harganya, Mushi cukup terjangkau, dengan merogoh kocek Rp 13 ribu Mushi bisa didapatkan untuk ukuran 80 gram. Sebelum pandemi Covid-19, jamur krispi Mushi mampu terjual 12 ribu pcs dalam sebulan. Namun, semenjak pandemi penjualannya sempat anjlok 80 %.

Sekarang, perlahan dengan mulai menurunnya angka Covid-19, omzet Mushi berangsur kembali naik. Bahkan saat ini Lia tengah menyiapkan Mushi untuk dijual di Amerika.

“Saya sudah membuat keemasan khusus untuk dijual ke Amerika, mungkin nanti saya akan jual dengan harga 3,5 dolar untuk satu pcs. Sebelumnya saya juga sempat tanda tangan kontrak untuk menjual Mushi di beberapa negara lain seperti, Singapura, Malaysia, dan Australia, tapi tertunda karena terjadinya pandemi,” ungkapnya.

Lia menuturkan, untuk mencapai pada posisi ini ia harus melewati berbagai kondisi, tapi dia terus berusaha dan tak patah arang. Hal itu terbukti dengan keberhasilan Mushi menembus retail modern hingga pasar global. Lia berharap semoga perjalanan Mushi akan memberi inspirasi bagi para pelaku UMKM lainnya.

“Untuk pelaku UMKM, baik yang baru memulai ataupun yang sudah berjalan tetap semangat dan telaten. Jangan mudah putus asa. Namanya juga usaha pasti ada naik turunnya, dan yang paling penting harus rajin berdo’a,” pungkas Lia. •par

Sekretaris DPRD Ikin Asikin

Mantan Atlet , Hobi Berkebun

Saat muda, Ikin pernah jadi atlet karate dan sempat mewakili daerahnya di Kejurda. Ia juga menggemari hobinya berkebun. Bagaimana kisahnya?

Bicara olahraga, laki-laki satu ini memiliki kisah sendiri. Kegemarannya dalam berbagai jenis olah tubuh sejak muda, sempat membawanya bercita-cita menjadi guru olahraga.

“Saya gemar olahraga apapun dari sepakbola, futsal, voli, basket sampai bela diri. Makanya saya dulu pernah ingin sekali jadi guru olahraga,” ujar pemilik nama lengkap Ikin Asikin.

Saat masih duduk di bangku SMP, Ikin bahkan pernah menyabet gelar atlet karate.

“Jadi atlet sejak SMP terus berlanjut sampai saya bekerja. Dan sudah sampai sabuk hitam,” ungkap Ikin.

Selama dirinya menjadi atlet, banyak kejuaraan yang telah ia ikuti mulai dari tes naik sabuk sampai lomba kejuaraan tingkat daerah (Kejurda) mewakili banyak instansi.

“Walaupun belum pernah juara tapi saya selalu dipercaya untuk ikut kejuaraan-kejuaraan tersebut,” ujarnya terkekeh.

Bagi Ikin, karate adalah olahraga yang paling ia gemari. Meski semua cabang olahraga apapun ia bisa.

“Ya semua bisa dari bola, voli, bulu tangkis maupun futsal. Cuman bisa enggak mahir-mahir amat. Dengan berolahraga banyak pelajaran yang dapat diambil terutama soal kekompakan tim,” tuturnya.

Selain itu, ada juga nilai sportifitas yang selalu dijunjung tinggi. Di usianya saat ini, ia juga tetap berolahraga untuk menjaga kebugaran tubuhnya.

Di sela-sela obrolan, Ikin menceritakan pengalamannya ketika bermain sepakbola beberapa waktu lalu antara eksekutif dengan legislatif Kabupaten Cirebon dalam rangka memeriahkan HUT Kabupaten Cirebon ke 540.

“Ya walaupun kami kalah mas, dan saya pada saat itu berposisi sebagai gelandang tengah. Tapi itu sangat berkesan,” terang Ikin.

Bagi Ikin, itu adalah momen menarik. Karena saat berolahraga semua orang tak lagi memiliki batasan karena perbedaan status sosial, karir maupun pekerjaan. Semuanya baik anggota dewan, ASN Pemkab Cirebon menyatu menjadi tim. Itu juga alasan menurutnya mengapa olahraga adalah hal yang paling berkesan.

“Kalau di tempat kerja kadang kita punya batasan antara atasan dan bawahan kalau olahraga itu kan tidak ada,” jelasnya.

Namun demikian, cita-cita Ikin saat muda menjadi guru olahraga ternyata berbeda dengan takdir. Ia justru diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Cirebon dimulai dari bagian keuangan, Camat hingga kini menjadi Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon.

Di luar dari kebiasannya berolahraga hingga kini, Ikin juga memiliki hobi lain yakni berkebun. Ia memiliki ladang yang ia tanami berbagai macam tumbuhan seperti kopi, palawija, pisang dan sejenisnya.

“Kalau libur ya saya di kebun mas, kita punya



kebud sendiri di Majalengka tepatnya di atas puncak sadarehe," terangnya.

Ikin mengakui, sudah lama memiliki kebun itu karena kepeduliannya dengan alam. Ia juga tak sungkan menghabiskan waktu menginap berkebun jika sedang jenuh karena pekerjaan.

"Kalau sedang jenuh saya kadang nginep di kebun, dan kadang juga di lembah gunung Ciremai bareng teman-teman sekadar menjernihkan pikiran," ungkapnya.

Ikin memiliki prinsip jika manusia harus mau menanam dan tak merusak alam karena hidup berdampingan dan saling membutuhkan.

"Tanaman itu harus kita jaga dan rawat, mulai dari disiram, dikasih pupuk, dikasih vitamin, intinya jangan merusak alam. Kita semua kan butuh pada akhirnya. Tanpa alam manusia bisa apa?" ujarnya.

Semasa kecil, Ikin sudah membiasakan diri menanam karena kebiasannya bermain di kali, mencari ikan dan bermain di kebun.

"Masa kecil saya dulu indah,

bermain di sungai dan ikan itu masih banyak, sekarang banyak yang mencari ikan dengan cara yang tidak baik seperti diportas sampai diserum. Itu kan jelas merusak habitat dan alam," geramnya.

Di akhir percakapan, Ikin berpesan ketika merawat alam pada akhirnya akan menuai.

"Anak-anak sekarang harus bisa bagaimana mengolah kebun, menanam singkong, menanam padi, jangan hanya tau produk jadi nya saja. Ketika nanti pensiun jadi PNS, saya juga akan kembali ke alam mengurus kebun yang sudah saya punya saat ini," pungkasnya. •Kus



Tanung Hidayat Libur Sekolah, Berjualan Buah di Bus

Untuk menghidupi kebutuhannya, saat libur sekolah Tanung remaja akan berjualan buah. Termasuk menjajakannya di bus. Bagaimana kisahnya?

Laki-laki yang satu ini merupakan seorang pengusaha dari Cirebon wilayah timur. Usahanya yang bernama CV WTN Jaya tersebar di 2 tempat, di antaranya Desa Pengarengan dan Desa Gebang Mekar. Bisnisnya ini merupakan penjualan garam dan ikan, tak ayal namanya sudah tidak asing bagi para petani garam dan nelayan di wilayah setempat.

Jauh sebelum terpilih menjadi legislator, Tanung lebih dulu menggeluti bisnisnya berdagang hasil laut yang ia mulai sejak tahun 2000. Dimulai dari berbagai jenis ikan tangkap.

“Dari tahun 2000 hingga 2009, bisa dibilang usaha saya meningkat. Saya memiliki banyak pelanggan yang tersebar di beberapa wilayah 3 Cirebon. Dalam sehari saya bahkan mampu menjual 7 hingga 15 ton ikan,” ungkap Tanung.

Memasuki medio 2010, bisnis penjualan ikannya berada di titik nadir. Ia tengah mengalami kebangkrutan akibat pasokan ikan yang menurun. Tanung pun terpaksa memilih gulung tikar.

Meski demikian, Tanung tak menyerah begitu saja. Ia beralih berbisnis garam di tempat kelahirannya, Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan. Bisnis garamnya pun sedikit-demi sedikit meningkat tajam dalam 3 tahun.

Hingga pada 2013, Tanung harus menelan pil pahit kembali karena harga garam saat itu sedang turun, ditambah produksi garam yang tengah anjlok. Akibatnya ia juga sempat kewalahan. Namun kali ini, ia tak buru-buru berhenti. Ia tetap berta-





han menekuni bisnis garam,

“Saya menyadari kalau bisnis apapun pasti mengalami harga tinggi dan turun. Apalagi berbisnis garam yang tak selamanya untung. Makanya saya tetap bertahan untuk memilih menjadi penjual garam ini,” jelas Tanung.

Di tahun yang sama, Tanung yang memiliki banyak relasi ternyata diminta menjadi tim sukses (timses) salah satu caleg. Semula ia pun menyanggupinya. Seiring perjalanannya, Tanung yang semakin dikenal masyarakat mendapat respon positif dan mudah. Tak disangka, ia bahkan diminta mencalonkan pula menjadi caleg.

“Awalnya memang timses tapi justru saya didorong untuk maju. Setelah berdiskusi dengan keluarga akhirnya saya pun menerimanya untuk maju menjadi

caleg kabupaten. Alhamdulillah Pileg 2014 saya terpilih,” ujar pemilik nama lengkap Tanung Hidayat.

Memilih menjadi politisi, bagi Tanung juga tak terlepas dari kisah masa kecilnya. Semasa kanak-kanak, ia telah merasakan asam garam hidup. Untuk berangkat sekolah di SMP 3 Kanci, Tanung remaja, harus berjalan kaki terlebih dahulu sejauh 5 kilo. Tak ayal ia akan selalu kesiangan.

“Setiap berangkat sekolah, kalo tidak numpang teman saya jalan kaki, jadi hampir setiap hari kesiangan,” tuturnya.

Setiap libur sekolah, Tanung pun kerap menghabiskan waktunya untuk berdagang. Ia akan bepergian ke Ibukota Jakarta untuk berjualan ikan, berjualan buah di festival bancakan Sindanglaut dan Pasar Babakan.

Bahkan hingga SMK, kebiasaan itu ia lakoni. Tanung menjajakan buah di dalam bis kota jurusan Cirebon-Ciledug.

“Ya kalau dibandingkan 11 saudara, sepertinya hanya saya yang mengalami menjadi orang susah. Untuk bisa jajan saya harus berjualan dulu,” kenangnya terkekeh.

Menahun berdagang dan merasakan susah, menumbuhkan empatinya yang besar. Tanung berkeinginan membantu masyarakat yang kesulitan terutama dalam mendapatkan hak pendidikan dan kesehatan.

“Saya pernah menjadi orang susah, itulah kenapa saya ingin membantu masyarakat yang kesulitan. Banyak warga tak mampu yang enggak bisa berobat karena belum punya kartu sehat. Ada juga warga yang tak bisa beli buku maupun sekolah karena hanya cukup untuk makan,” jelasnya.

Ia pun mengaku, sejak terpilih hingga di periode keduanya saat ini, ia telah banyak diminta tolong para warga yang kesulitan mendapatkan kartu kesehatan (KIS). Ia juga telah menginisiasi pendirian saung literasi dengan mendirikan taman baca di Desa Babakan, Gagasari hingga Pasaleman. Tak sedikit para penggerak anak-anak disabilitas,” tambah Tanung.

Meski di tengah kesibukannya menjadi wakil rakyat, Tanung tetap konsisten menggeluti bisnisnya menjadi penjual garam. Baginya konsistensi merupakan kunci kesuksesan.

“Yang saya dapatkan saat ini merupakan hasil dari perjuangan saya dari bawah, doa orangtua serta konsisten. Jadi tidak ujug-ujug warisan dari orangtua atau apa, makanya saya tetap berwirausaha,” pungkasnya. •Par

Perda Retribusi Bangunan Gedung Disahkan

Beberapa pasal dalam Perda RPBG dihapus maupun perbaikan klausul setelah Pansus I mendapat masukan dan studi banding. Bagaimana isinya?



Setelah melewati beberapa tahapan rapat paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon bersama Bupati Cirebon akhirnya mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (RPBG).

Bupati Cirebon Imron menerangkan, jika bangunan gedung merupakan salah satu jenis retribusi perizinan tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Menurutnya, ketentuan terse-

but telah diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja yang mengubah ketentuan Pasal 141 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sesuai Surat Edaran (SE) Kemendagri tentang percepatan penyusunan regulasi persyaratan dasar perizinan bangunan gedung, serta retribusi, penggunaan tenaga kerja asing mengarahkan agar pemerintah daerah segera menetapkan peraturan daerah atau merevisi persetujuan bangunan gedung.

Imron juga menjelaskan Perda ini menjadi penting untuk acuan pemerintah daerah melakukan pemungutan pajak maupun retribusi.

“Sementara kalau kita lihat Pasal 286 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menerangkan jika pemerintah daerah dilarang memungut pajak daerah dan retribusi daerah sebelum adanya perda sebagai landasan hukum,” jelas Imron.

Sekretaris Pansus I DPRD Kabupaten Cirebon Diah Irwani In-



driyati mengatakan, sebelumnya Pansus I yang bertugas mengkaji raperda telah melakukan studi banding ke beberapa daerah agar penerapan Perda RPBG dapat berjalan optimal.

“Setelah mengkaji dan melakukan analisis ke daerah lain kami pun menyepakati untuk menyetujui raperda Retribusi PBG disahkan menjadi Perda,” ujar Diah.

Meski demikian, Diah menerangkan ada beberapa pasal yang diubah maupun ditambahkan di antaranya: pasal 1 ayat 4, pasal 13 ayat 4,5 dan 6 yang dihapus dan penambahan klausul di ayat 19.

“Ayat 19 surat bukti kepemilikan gedung yang selanjutnya

disingkat SBKG adalah surat tanda bukti atas status kepemilikan bangunan gedung,” terangnya.

Perubahan selanjutnya yakni pasal 3 ayat 2 yang mengalami penambahan pada huruf E sehingga berbunyi: objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah penerbitan RPBG untuk bangunan milik daerah atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

“Pasal 17 ayat 1 huruf a juga mengalami perubahan dari fungsi sosial dan budaya menjadi fungsi pendidikan keagamaan,” tutur Diah.

Dalam pasal 19 ayat 4 juga ditambahkan sehingga berbunyi: jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruh-

nya, lebih pembayaran retribusi dikembalikan.

Adapun Pasal 5 ayat 2 mengatur tata cara permohonan pengajuan persetujuan bangunan gedung yang menggunakan sistem informasi manajemen bangunan gedung yaitu sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk memproses penyelenggaraan PBG dan pendataan bangunan gedung disertai dengan informasi lainnya.

“Sementara dalam Pasal 9 ayat 3, klasifikasi bangunan gedung ditentukan berdasarkan tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko bahaya kebakaran, lokasi, ketinggian bangunan gedung, kepemilikan bangunan gedung, dan khas bangunan,” kata Diah.

Pasal 17 ayat 1 yang dimaksud bangunan gedung pendidikan keagamaan yakni pondok pesantren, MDTA dan sejenisnya.

“Pondok pesantren secara umum dapat terbagi menjadi pesantren terpadu atau pesantren salaf yang berbeda sumber penerimaan pengelolaan,” ungkap Diah.

Diah mengungkapkan, hasil perubahan maupun tambahan berasal dari masukan, saran dan perbandingan dengan daerah lain yang disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Cirebon.

Setelah disahkan, Diah pun meminta agar Pemkab Cirebon segera menindaklanjuti perda disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dilakukan evaluasi.

“Setelah raperda tentang RPBG di Kabupaten Cirebon menjadi perda, kita berharap Pemda segera menerapkan sesuai ketentuan agar tercapainya retribusi secara optimal dan dapat menguatkan iklim investasi,” pungkasnya. •Kus

Validitas LKPJ 2021 Dipertanyakan

Setelah membaca LKPJ Bupati 2021, DPRD Kabupaten Cirebon menyimpulkan ketidakvalidan data dalam LKPJ 2021 yang berbeda dengan laporan BPS. Seperti apa?



Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Teguh Rusiana Merdeka menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Cirebon tahun anggaran 2021. Menurutnya sumber data penyusunan LKPJ Bupati tahun 2021 tidak dapat diyakini kebenarannya. Karena angka-angka yang muncul memiliki perbedaan data.

“Angka-angka LKPJ justru tak jauh berbeda dengan data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon. Kalau kedua data itu dibandingkan dengan milik BPS Kabupaten Cirebon maka akan kelihatan perbedaannya. Kita memang mengaitkan pula dengan visi misi bupati,” ujar Teguh.

Misalnya berkaitan pencapaian kinerja target

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang direncanakan sebesar 69,93 persen pada RPJMD, realisasi pada LKPJ sebesar 69,12 persen. Namun setelah diklarifikasi ke BPS pencapaian IPM justru berada di angka 69,83 persen.

Selanjutnya, peningkatan derajat pendidikan masyarakat dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Dalam RPJMD, Teguh mengungkapkan, RLS ditargetkan mencapai 7,05 dalam setahun, sedangkan realisasi dalam LKPJ tercatat 7,10 tahun. Padahal data BPS mencatat, pencapaiannya 6,88 tahun.

Selain itu, indikator HLS yang ditargetkan 12,34 tahun pada 2021 dalam RPJMD, realisasi menurut data LKPJ adalah 12,86 tahun.

“Namun, Setelah diklarifikasi ke BPS Kabupaten



Cirebon, diketahui capaiannya hanya 12,27 tahun. Belum sesuai target,” ungkapnya.

Perbedaan lainnya muncul pada program kesejahteraan sosial berupa indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Menurut data dari LKPJ dan RPJMD tercatat 11,12 persen dan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 23,25 persen.

Sedangkan menurut data dari BPS Kabupaten Cirebon diperoleh angka 10,38 persen TPT dan PDRB sebesar 22,10 %.

“Maka dengan ini, saya berat hati meragukan kebenaran data dari LKPJ Bupati 2021,” jelas Teguh.

Selanjutnya, pencapaian kinerja dalam menurunkan kelompok masyarakat yang mengala-

mi disfungsi sosial. Dengan indikator persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani. Dalam RPJMD dan LKPJ, angka yang muncul sama yakni 70,17 persen. Sementara data pembandingan dari BPS belum diketahui hasilnya.

Dalam upaya meningkatkan daya saing angkatan kerja dengan indikator rasio kesempatan kerja, RPJMD menargetkan sebesar 57,22 persen. Sedangkan dalam realisasi pada data LKPJ sebesar 88,88 persen.

“Indikator tersebut setelah klarifikasi ke BPS datanya juga belum diketahui. Kita juga belum tahu apakah angka 88,88 % telah sesuai,” kata Teguh.

Teguh mengatakan, salah satu misi Bupati Cirebon yak-

ni meningkatkan produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul di tingkat nasional dan regional. Tujuan dari misi ini yakni untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan indikator laju pertumbuhan ekonomi direncanakan sebesar 4,38 dan terlaksana sebesar 4,38 persen.

“Padahal data BPS justru mencatat belum terealisasi karena hanya 2,30 persen. Ini kan terpaut jauh,” ujarnya.

Tujuan selanjutnya dari visi Bupati Cirebon adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan indikator reformasi birokrasi, menurut data RPJMD direncanakan sebesar 60 persen sedangkan dalam LKPJ sebesar 55 persen. Sementara data pembandingan dari BPS belum diketahui hasilnya.

Dari hasil laporan yang disampaikan Bupati Cirebon mengenai LKPJ tahun 2021, Teguh menyimpulkan dalam laporan LKPJ 2021 banyak mengalami penggelembungan data karena tidak sesuai dengan hasil sebenarnya.

Menurutnya, DPRD menilai LKPJ Bupati 2021 belum memenuhi target sebagaimana dalam RPJMD. Oleh karena itu, ia pun menyarankan agar ada perbaikan data yang sesuai dengan kondisi riil. Dari visi misi bupati dan program kerja belum sepenuhnya target diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

“Selain kami ingin LKPJ disusun sebenar-benarnya, DPRD Kabupaten Cirebon merekomendasikan agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa mengoptimalkan kinerja untuk mencapai target pembangunan sebagaimana visi misi bupati,” pungkasnya. •Soy

Bukit Pasir Selawe Segera Jadi Wisata Paralayang

Bukit Pasir Selawe dinilai layak jadi lokasi wisata paralayang, sebab miliki ketinggian yang mendukung. Pemesan berharap agar ada upaya bersama wujudkan destinasi adrenalin tersebut.



Kawasan Agroforesti Bukit Selawe yang berada di Desa Kertawangun, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon diwacanakan akan menjadi lokasi wisata paralayang. Selain udara sejuk ditambah panorama alam yang memanjakan mata di setiap sudut, Bukit Salawe memiliki ketinggian kurang lebih 378 meter dengan kondisi angin yang mendukung untuk disulap menjadi lokasi wisata olahraga lepas landas.

Olahraga paralayang atau lepas landas dari sebuah lereng atau bukit memang menjadi pilihan yang tak kalah adrenalin. Meski demikian dibutuhkan lokasi yang benar-benar sesuai.

Kepala Desa Kertawinangun Mastidja mengungkapkan, atlet paralayang Jawa Barat pernah melakukan uji coba *take off* di daerah tersebut. Hasilnya

mereka begitu puas dan merasa tempat tersebut layak menjadi salah satu lokasi olahraga adrenalin di Jawa Barat.

Menurutnya, inisiatif atlet paralayang melakukan uji coba di daerah ini berawal dari keinginan Pemerintah Kecamatan Sedong yang mengetahui potensinya pada 2020 lalu. Tak ingin tinggal diam, mereka pun bergegas melakukan studi banding di wisata paralayang Kabupaten Majalengka.

Setelah itu dilanjut berkonsultasi dengan Angkatan Udara Penggung, Harjamukti Kota Cirebon dan meminta Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Jabar agar atlet paralayang melakukan uji coba.

“Hasilnya, PASI Jawa Barat dan TNI AU Penggung berkomitmen mendorong Bukit Pasir Palawe menja-



di lokasi pariwisata paralayang. Nantinya, para atlet belajar teori paralayang di Pangkalan TNI AU Penggung dan praktiknya di Bukit Pasir Palawe,” kata Mastidja.

Sejalan dengan potensi kegiatan paralayang, Pemdes Kertawinangun berencana membangun bumi perkemahan seluas 1 hektare agar para wisatawan dapat menginap menikmati panorama alam dan serunya para atlet paralayang berselancar di udara.

Mastidja berharap agar Desa Kertawangun dapat segera menjadi desa wisata paralayang.

Dengan begitu, ia optimistis perekonomian warga lokal akan bertambah, karena dapat membuka kran lapangan pekerjaan dan menciptakan geliat perekonomian masyarakat sekitar.

Namun rencana besar tersebut tak bisa hanya mengandalkan kemampuan desa karena terbatasnya anggaran. Sementara untuk membangun proyek wisata paralayang memerlukan biaya yang besar. Karena itu Pemdes Kertawinangun menginginkan agar seluruh seluruh jajaran pemerintah baik kota, provinsi dan

pusat bisa turut membantu.

“Kami sebagai pemdes hanya punya tempat wisata. Untuk siapa kepemilikannya saya belum bisa memastikan. Tetapi Desa Kertawangun tetap akan menerima banyak manfaat bila pembangunan wisata paralayang ini bisa terwujud,” ungkap Mastidja.

Sejauh ini, potensi Bukit Pasir Salawe telah diketahui Pemkab Cirebon. Pada tahun 2020, Bupati Cirebon bersama Wakil Bupati Cirebon sempat berkunjung ke Bukit Salawe. Mereka pun mengakui jika panorama alam yang indah di Bupati Pasir Salawe layak digarap menjadi destinasi wisata. Pemkab Cirebon pun berjanji akan terus memantau dan berencana mengonsultasikan hal tersebut ke dinas dan DPRD.

“Pak Bupati sudah mengamini kalau wisata ini benar-benar terwujud akan memberikan keuntungan untuk masyarakat di sekitarnya. Walau sebenarnya saya juga kurang tahu apakah bukit ini sudah layak persyaratan menjadi lokasi wisata,” tutur Mastidja.

Sementara DPRD Kabupaten Cirebon juga kembali berkunjung ke Kantor Kecamatan Sedong belum lama ini. Dalam kesempatan tersebut, para legislator menyetujui Desa Kertawangun masuk sebagai kawasan proyek desa wisata Kabupaten Cirebon dan tengah dikaji Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.

“Belum ada kelanjutannya sejak dari 2 tahun lalu karena masih ada Pandemi Covid-19. Nanti kalau sudah siap akan ada tindak lanjut dari dinas untuk dibentuk Kelompok Sadar Wisata yang difasilitasi Pemkab Cirebon. Semoga itu benar-benar segera,” pungkasnya. •Muiz

Beber

Manfaatkan Hutan Jadi Wisata Belajar

Pemdes Beber akan memanfaatkan hutan terbengkalai menjadi tempat wisata yang mendidik guna meningkatkan PADes. Seperti apa?



Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon memiliki hutan seluas 100 hektare yang akan disulap menjadi wisata edukasi. Sebelumnya hutan tersebut sudah lama tak disentuh dan dirawat.

Kuwu Desa Beber Momon mengatakan, rencana tersebut, selain berguna menjadi aset desa yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) juga agar pemulihan ekonomi dapat tercapai.

“Kita tahu sejak pandemi kemarin, kondisi ekonomi warga maupun desa mengalami penurunan. Makanya target pasca pagebluk ini kita akan fokus meningkatkan PADes dan UMKM

masyarakat,” ujar Momon.

Rencananya, hutan edukasi itu akan menjadi referensi tempat belajar *outdoor* atau belajar sambil bermain. Selain itu masyarakat sekitar juga dapat membuka usaha di sekitar lokasi.

Momon pun berencana memberi nama hutan edukasi tersebut dengan sebutan ‘Bulak Baca’ karena akan diisi perpustakaan, pembibitan hingga penangkaran madu.

“Jadi semacam wadah literasi, edukasi pertanian dan peternakan. Nanti masyarakat bisa sambil berjualan di sana, lumayan buat nambah penghasilan,” jelas Momon.

Momon memastikan akan

tetap fokus untuk realisasi pemanfaatan kawasan hutan pada tahun ini. Ia juga mengajak masyarakat untuk menghasilkan karya kreatif dari hasil hutan.

“Selain fokus pada program pembenahan hutan menjadi wisata edukasi, kami juga mengajak masyarakat agar bisa lebih kreatif dan inovatif membuat kerajinan dari rotan. Saat ini sudah ada pot bunga karya warga sekitar,” tambahnya.

Momon mengungkapkan, tercapainya program tersebut juga harus dilakukan oleh semua warga. Ia berharap masyarakat dapat bergotong-royong menyukseskan dan menumbuhkan kembali jiwa sosial. Sejauh ini, ia melihat nilai gotong royong masyarakat semakin menurun.

“Dengan program ini saya berharap masyarakat bisa lebih peduli dengan sesama. Saya juga mengajak pemuda untuk bisa bergotong-royong menyulap potensi hutan itu lebih bermanfaat bagi masyarakat desa,” ungkapnyanya.

Ia pun berharap, pandemi Covid-10 benar-benar reda agar segala visi misi desa dapat terwujud.

“Karena pandemi beberapa program saya harus tertunda, karena anggaran harus dialokasikan pada kebutuhan masyarakat. Semoga tahun ini Covid bisa hilang,” pungkasnya. •Kus

Sindangmekar

Kuliah Gratis Untuk Warga

Program bernama kuliah gratis tengah digagas Pemdes Sindangmekar untuk memastikan para warga mendapat hak akses pendidikan tinggi.



Pemerintah Desa (Pemdes) Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang berkeinginan para warga bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Sejauh ini, persentase para remaja yang menempuh jenjang pendidikan tinggi baru sedikit. Penyebab utamanya karena keterbatasan ekonomi maupun kurangnya kesadaran.

Sekretaris Desa Sindangmekar Sihabudin mengatakan, para remaja enggan melanjutkan pendidikan ke strata perguruan tinggi karena besarnya biaya kuliah. Walhasil, kebanyakan dari mereka menunda untuk melanjutkan pendidikan. Selain faktor

ekonomi, para remaja masih belum menganggap pendidikan sebagai faktor penting dalam menjawab tantangan di masa mendatang.

“Para remaja masih belum memandang pendidikan sebagai prioritas. Pasca lulus dari bangku SMA, mayoritas mereka langsung terjun ke dunia kerja demi mengejar kemampuan finansial. Padahal, ini akan menjadi penghambat mereka untuk mencapai kesejahteraan di masa mendatang,” ujar Sihabudin.

Oleh karenanya, Pemdes Sindangmekar telah mencanangkan program kuliah gratis yang sedang dibahas. Mereka tengah

menggodoknya bersama BPD pada tahun ini.

Melalui program kuliah gratis, Sihab, sapaan akrabnya, berharap akan menjadi solusi jangka panjang bagi warga Desa Sindangmekar dalam mengakses pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang kurang mampu secara finansial.

“Progresnya sedang kami kebut dan akan segera kami musyawarahkan dengan BPD dalam Musrenbangdes. Semoga semua sepakat kalau menyiapkan SDM unggul warga adalah keharusan,” jelas Sihab.

Untuk mewujudkan program kuliah gratis, kata Sihab, Pemdes Sindangmekar akan mengutamakan pembiayaan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADes) sebagai motor penggerak utama. Oleh karenanya, upaya menggenjot PADes pun juga akan terus dilakukan. Selain itu, Pemdes juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Cirebon.

“Sudah ada beberapa kampus yang ngasih beasiswa untuk desa kita. Program ini merupakan pondasi dasar untuk mengawali kemajuan Desa Sindangmekar. Saya hanya berharap masyarakat turut hadir dan ikut serta mendukung program yang sedang diupayakan,” pungkas Sihab.

•Mir



Visi Bobadan vs Visi Beneran

Dulu saya bertanya pada diri sendiri, bisakah dalam masa jabatan lima tahun seorang kepala daerah mampu membangun daerahnya? Jujur, waktu itu hanya yakin: bisa. Sekarang? Tambah yakin *dong*.... Kok bisa?

Sebenarnya, dalam tiga atau empat tahun setelah menjabat, kinerja seorang kepala daerah akan terlihat: terasa ada perubahan di daerahnya. Sebelum dilanjutkan, silakan sejenak, rasakan-renungkan tentang daerah Anda, bagaimana perubahannya?

Kita lanjutkan dulu ya, nanti Anda bisa renungkan kembali. Kenapa bisa demikian (dalam tiga-empat tahun ada perubahan)? Mari lihat beberapa contoh saja.

Joko Widodo ketika menjadi Walikota Solo di periode pertama (sekitar tiga atau empat tahun setelah menjabat), sukses membenahi PKL, terminal bus, dan mem-branding Solo. Walhasil di pemilihan periode kedua, ia meraup suara 90%, sebelumnya di periode pertama hanya 36,62%.

Hal yang sama juga dialami Tri Rismaharini yang dianggap mampu mengubah wajah Kota Surabaya, dengan membangun taman-taman kota dan menertibkan PKL. Sehingga di periode kedua ia mendapatkan kepercayaan 86,34% suara, sebelumnya hanya 38,53%.

Tak kalah dengan Jokowi dan Risma, yang paling fenomenal adalah Abdullah Azwar Anas dalam membangun Kabupaten Banyuwangi selama dua periode (2010-2020). Ini contoh yang tepat bagi Kabupaten Cirebon, karena sama-sama kabupaten.

Pada saat ia memulai memimpin Banyuwangi di 2010, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (KPPD) Banyuwangi menurut evaluasi Kemendagri berada di peringkat 156 dari 395 kabupaten seluruh Indonesia. Lima tahun (2015) setelah menjabat meningkat di posisi 20, kemudian pada 2016 di posisi 16, 2017 di posisi 6, 2018 peringkat 4, dan 2019 peringkat pertama. Luar biasa!

Evaluasi KPPD oleh Kemendagri itu dilakukan pada enam urusan pemerintahan: pendidikan, kesehatan, PUPR, pertanian, pariwisata, hingga penanga-

nan kemiskinan. Dari enam indikator tersebut, dirinci lagi menjadi 800 lebih indikator kinerja daerah.

Apakah semua indikator itu dikerjakan Anas? Ia fokus pada pariwisata sebagai penggerak utama pembangunan Banyuwangi sejak awal kepemimpinannya. Berbagai bidang disinkronisasikan untuk mendukung pengembangan pariwisata.

Dinas lainnya, seperti pertanian, pengairan, pekerjaan umum, serta perindustrian dan perdagangan harus berjalan di rel yang berujung sama: pariwisata. "Semua dinas adalah dinas pariwisata," seloroh Anas pada sebuah kesempatan. Itu karena Anas tahu persis daerahnya, dan pariwisatalah yang menjadi *leading sector* pembangunan untuk keluar dari kemiskinan.

Anas pun berhasil menanamkan komitmen tinggi kepada para kepala dinas terhadap fokus pembangunan yang telah digariskan, dengan segala inovasinya. Ia juga mampu menyampaikan visinya secara jelas ke aparat birokrasi di bawahnya. Inilah kunci penting keberhasilan Anas: visi pembangunan menginternalisasi dan menjiwai seluruh aparatnya.

Beberapa program yang digarap Anas: *Banyuwangi Ethno Carnival*, *Banyuwangi Jazz Festival*, *Tour de Ijen*, *Banyuwangi Festival*, dan *Banyuwangi Eco-tourism*. Ia juga melengkapi sarana dengan membangun Bandara Internasional Banyuwangi. Sedangkan di bidang pendidikan ia membuat SAS (siswa asuh sebaya).

Hasilnya? Kemiskinan diturunkan ke level 7,52% (2019), padahal sebelumnya 20,09% (2010). Pendapatan per kapita melonjak menjadi Rp 51,80 juta per orang per tahun (2019), sebelumnya (pada 2010) hanya Rp 20,86 juta.

PDRB juga terus naik, menjadi Rp 83,61 triliun, sebelumnya hanya Rp 32,46 triliun. Turis domestik dari 654.602 orang (2010) menjadi 5,48 juta orang (2019). Turis mancanegara dari 16.977 orang (2010) menjadi 109.089 orang (2019).

Secara politik pun keberhasilan Anas tercermin dalam perolehan suara di pilkada periode kedua, yang mencapai 88,96%. Di periode sebelumnya ha-

nya 49,23%.

Buah dari keseriusan pengaplikasian visi seorang pemimpin telah dibuktikan oleh Anas: keluar dari kemiskinan, kabupaten berkinerja terbaik (peringkat pertama) se tanah air, dan pengakuan politik secara elektoral.

Bagaimana dengan Kabupaten Cirebon? Kini kita menjumpai angka-angka statistik yang memprihatinkan. Angka pengangguran tertinggi di Jabar dan tingkat kemiskinan lima terbesar di Jabar.

Pada 2021, persentase penduduk miskin di Kabupaten Cirebon mencapai 12,30%, atau sekitar 271,02 ribu jiwa. Sedangkan pengangguran terbuka sebanyak 10,38%, atau sekitar 112.429 pengangguran. Angka tersebut masih di atas angka pengangguran Provinsi Jawa Barat yang mencapai 9,82%.

Data 2020 pendapatan perkapita Kabupaten Cirebon sebesar 21,87 juta rupiah. Angka ini hampir sama dengan kondisi Banyuwangi 10 tahun yang lalu. Bahkan prosentase kemiskinan di Banyuwangi waktu itu lebih parah (20,09%), kini mereka jauh lebih maju.

Sekarang, mari cek bagaimana penilaian Kemendagri terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Cirebon. Pada 2014, Kabupaten Cirebon berada di peringkat 64 dari 395 kabupaten seluruh Indonesia. Sedangkan pada 2017, Kabupaten Cirebon terjun bebas ke peringkat 316.

Ini lebih memprihatinkan lagi jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten tetangga. Indramayu yang sebelumnya (2014) di peringkat 123, pada 2017 di posisi 41, dan Majalengka yang sebelumnya di peringkat 66 menjadi 45.

Sedangkan Kuningan membuat capaian luar biasa, sebelumnya (pada 2014) di posisi 71 menjadi peringkat 5. Jadi, ketika para kabupaten tetangga unjuk gigi, Kabupaten Cirebon malah jeblok.

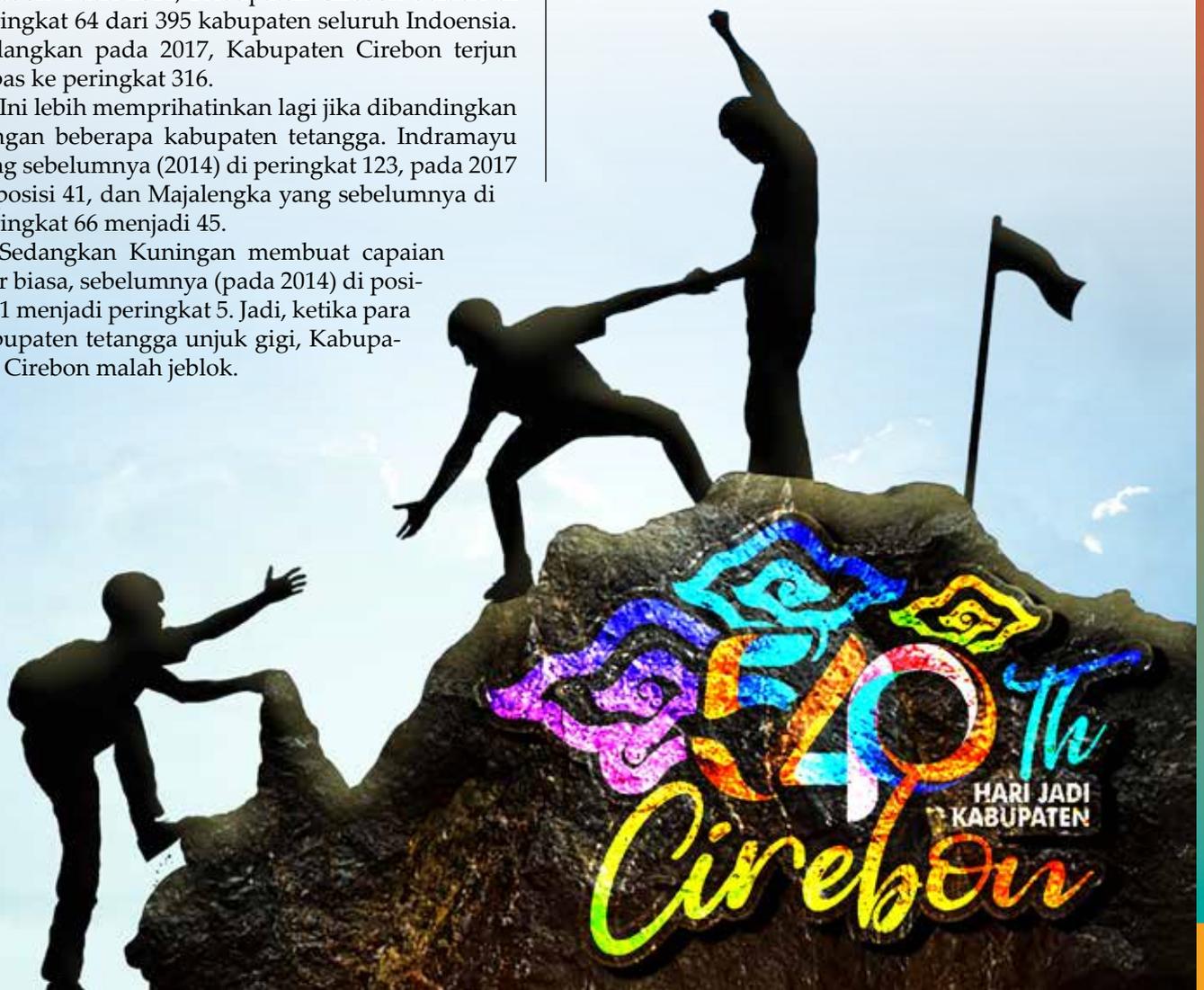
Eit...Namun, kita tak perlu berlama-lama meratapi angka-angka yang memprihatinkan. Saatnya sekarang berubah, dimulai dengan (salah satunya) belajar dari Banyuwangi. Betapa visi seorang pemimpin telah menjadi mesin yang memompa kinerja.

Untuk itu pertama mari kenali potensi diri, lalu buat visi yang serius dan menjawab persoalan. Jangan asal hanya karena untuk memenuhi syarat mendaftar di KPUD, atau hanya pajangan di RPJMD.

Jika memiliki visi dan determinasi untuk mewujudkan visi, saya yakin dalam empat tahun sebuah daerah akan berubah, seperti halnya Solo, Surabaya, dan Banyuwangi. Saatnya sekarang membuat itu, tidak ada kata terlambat.

Di HUT Kabupaten Cirebon (yang konon) ke-540 ini mari kita mulai fokus membangun Kabupaten Cirebon. Jangan lagi setiap ulang tahun kabupaten, kita terjebak pada isu artifisial: perdebatan hari lahir kabupaten dan kota Cirebon.

"Diskusi hari lahir bae, kapan diskusi mikiri rakyat," begitu celetukan beberapa teman. Waktunya kita menyusun ulang visi yang *beneran*, bukan formalitas, apalagi visi *bobadan*. Selamat ulang tahun Cirebon, bahagia selalu!





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Marhaban ya Ramadhan



Selamat Menunaikan Ibadah Puasa
1 Ramadhan 1443 H